



RENJA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas curahan rahmat dan ridho-Nya, Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Penyusunan Renja Tahun 2022 berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2022.

Berpedoman pada Renstra, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja dengan Renstra. Berpedoman pada RKPD bertujuan untuk memastikan bahwa program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Pendapatan Daerah selaras dengan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 disusun dengan beberapa tahapan, meliputi: Persiapan Penyusunan Renja; Penyusunan Rancangan Awal Renja; Penyusunan Rancangan Renja; Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; Perumusan Rancangan Akhir Renja; dan Penetapan Renja. Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 disajikan dengan sistematika: Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penutup. Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan, menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2022.

Demikian Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2022 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja khususnya Bappenda sehingga dapat mendorong terwujudnya Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor serta program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara terukur dan akuntabel.

Cibinong,

2021

K E P A L A,



ARIF RAHMAN

NIP. 197507232002121008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	iii	
Daftar Tabel	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	10
	1.3. Maksud dan Tujuan	14
	1.4. Sistematika Penulisan	14
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	18
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	79
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	83
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN III-1 DAERAH	
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	86
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	98
	3.3. Program dan Kegiatan	100
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	105
BAB V	PENUTUP	137

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keterkaitan Renja Terhadap RKPD Tahun 2022	6
Tabel 1.2	Pencapaian Target Sasaran Daerah Tahun 2022	7
Tabel 1.3	Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022	9
Tabel 1.4	Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2022	
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020	
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Hingga Tahun 2020	81
Tabel 3.1	Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional	96
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022	99
Tabel 3.3	Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	103
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	108

LAMPIRAN * KEPUTUSAN BUPATI**

NOMOR : ***

TANGGAL : ***

**RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, dengan memedomani tahun perencanaan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Dalam hal penyusunan Renja Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bogor sedang melakukan proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang secara otomatis diikuti oleh perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan akibat terjadinya perubahan-perubahan mendasar seperti terjadinya bencana alam, bencana pandemi covid-19, serta perubahan-perubahan kebijakan nasional yang mulai diberlakukan pada tahun 2021.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Adanya kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah memberikan warna baru dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2022 yang ditandai dengan adanya perubahan revolusioner pada program dan kegiatan yang diampu, serta adanya penambahan sub-sub kegiatan yang mengiringi kegiatan. Hal ini berkonsekuensi dilakukannya pemetaan yang menyinergikan seluruh program sebelumnya yang telah

ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan program yang telah ditentukan secara seragam oleh pemerintah untuk seluruh kabupaten/kota se- Indonesia, mulai tahun 2021. Dengan demikian, sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tersebut, Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk periode tahun 2022 yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja dan pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai penjabaran dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, bidang urusan pendidikan, serta sub urusan yang telah ditetapkan. Renja ini disusun dengan tetap mempedomani Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2018- 2023 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2022.

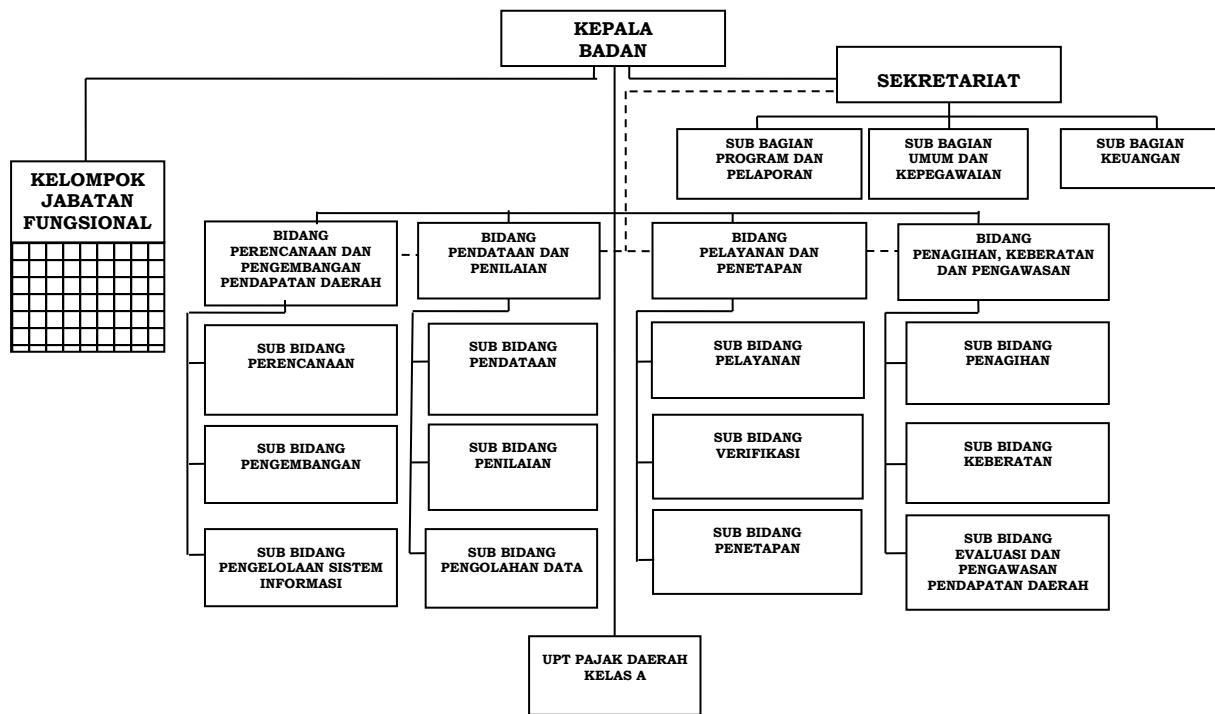
Selanjutnya, penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2022 dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Nomor 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Renja, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini mengatur perencanaan pada nomenklatur program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya Perangkat Daerah wajib untuk melakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dimulai pada RKPD Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Bogor pada penyusunan RKPD Tahun 2022 melakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, namun tidak merubah target untuk semua indikator kinerja tahunan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka berkesinambungan dengan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Bappenda. Sehubungan dengan hal tersebut Bappenda mengalami perubahan SOTK yang disesuaikan dengan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan yang baru. Dasar perubahan SOTK Bappenda dikarenakan munculnya Permendagri 90 Tahun 2019, dimana nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah diatur dari Kementriannya dan sudah baku tidak dapat ditambah atau diganti nama, akan tetapi boleh jika Sub Kegiatan yang sudah diatur jika kita tidak akan memakainya. Perubahan susunan SOTK Bappenda ini merupakan unsur yang memiliki urgensi tingkat tinggi untuk segera dituntaskan. Pasalnya SOTK Bappenda yang sekarang ini jika dipakai untuk Sub Kegiatan yang baru dari Permendagri 90 Tahun 2019 maka tidak berkesinambungan atau terkesan memaksakan. Dikarenakan SOTK Bappenda yang sekarang ini terdiri dari Sekretariat dan 4 bidang yang namanya sesuai dengan jenis Pajak Daerah, jika dilihat dari nama Sub Kegiatan baru makan beberapa jenis pajak itu digabungkan dalam satu Sub Kegiatan.

Adapun bagan struktur baru Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 1.1



Berdasarkan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana kita ketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi: Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim

penyusun Renja Perangkat Daerah, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Renja berpedoman pada Renstra, hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Renstra. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra.

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja berdasarkan Surat Edaran Bupati tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Renja Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA, paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat Edaran Kepala Daerah diterima. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Rancangan Akhir Renja, yang merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada. Rancangan akhir Renja

disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi dan setelah itu Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib terintegrasi dengan penyusunan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2022. RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2022 menjadi pedoman bagi KUA-PPAS, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Program dan Kegiatan yang tercantum dalam RAPBD tidak boleh berbeda dengan program dan kegiatan yang sudah tertuang dalam RKPD Tahun 2022. Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Selain itu, RKA SKPD disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) yang telah disepakati Kepala Daerah.

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor memiliki keterkaitan dengan RKPD Tahun 2022, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Keterkaitan Renja terhadap RKPD Tahun 2022

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OUTCOME		TARGET	
		TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN
Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik dalam rangka pemulihan ekonomi daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Target PAD	100	Persentase
		Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	5	Persentase

Tabel 1.2
Pencapaian Target Sasaran Daerah Tahun 2022

PROGRAM	OUTCOME		TUJUAN DAN SASARAN PD	KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	KINERJA SASARAN DAERAH		
	TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN		INDIKATOR	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			Tujuan : Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Efektif dan Akuntabel	Indikator Tujuan : Rasio PAD	44,25	%	Tujuan : Terwujudnya Masyarakat Bogor Maju dan Penyelenggaraan Pemerintah yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi		
			Sasaran : Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah yang efektif	1.Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	49,67	%	Sasaran: Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (predikat)		
				2. Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	69,67	%		Nilai AKIP (predikat/poin)		
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Target PAD			100,00	%				
	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD			5	%				

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja

Perangkat Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, menjadi pedoman bagi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

Renja juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Renstra-KL), yang merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Sementara itu, Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor memuat maksud dan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Oleh karenanya, dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, maka pencapaian sasaran, program, dan kegiatan dalam Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Tabel 1.3

Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
		TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5		6
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Target PAD	100,00	Persentase	29.189.512.839
		Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	5	Persentase	
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penunjang Urusan Pemerintahan	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Terlaksananya semua kegiatan pada Program Penunjang	100,00	Persentase	155.952.390.879
						185.141.903.718

Keterkaitan Renja dengan Program dan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4

Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2022

PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
		TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5		6
Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah	Persentase Realisasi Pencapaian Target PAD	100,00	Persentase	29.189.512.839
		Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	5	Persentase	

	Penunjang Urusan Pemerintahan	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Terlaksananya semua kegiatan pada Program Penunjang	100,00	Persentase	155.952.390.879
						185.141.903.718

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022, Perangkat Daerah dihadapkan pada tantangan paska penanganan virus COVID-19. Seperti dipahami bahwa penyebaran COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan dunia. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Publik Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (COVID-19), hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Jawa Barat menunjukkan perkembangan meningkat dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas di Jawa Barat. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2022 ini, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak COVID-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Jawa Barat dari 9 prioritas lainnya yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) / Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 17. Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

- 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 15); dan
 20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 59).
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4);
 26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 36) ;
 27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98) ;

28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 50 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 51) ;
29. Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 56) ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan bahan RAPBD tahun 2022.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022, yaitu:

1. Menjadi panduan dalam merumuskan target kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2022;
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022;
3. Menjadi panduan untuk menyusun rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS, RKA dan RAPBD Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 disajikan dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Memuat sistematika Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

- Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun lalu (tahun 2020);
- Menjelaskan pencapaian target Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun-tahun sebelumnya;
- Melakukan review hasil evaluasi-evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dan/atau realisasi APBD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Menjelaskan capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan indikator yang sudah ditentukan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Menjelaskan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang meliputi pelayanan, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Menjelaskan hasil penelaahan menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Menjelaskan hasil rumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mendukung dilaksanakannya program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.4. Dukungan terhadap Pencapaian target Pancakarsa

Pancakarsa merupakan kinerja strategis Bupati dan Wakil Bupati Bogor periode tahun 2018-2023. Untuk itu, Pancakarsa menjadi target strategis yang perlu dituntaskan hingga akhir periode.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Menjelaskan mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022.

BAB V. PENUTUP

Berisi catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun apabila anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan penetapan dokumen Renja oleh Kepala PD setelah mendapat pengesahan dari Bupati Bogor, meliputi : (1) tempat dan tanggal dokumen, (2) nama Perangkat Daerah, nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 dan Capaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Pada Tahun Anggaran 2020, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan tersebut ditandai dengan rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar 104,31 % dengan kategori predikat Sangat Tinggi. Uraian capaian kinerja IKU adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, dari target sebesar 33,61 % terealisasi sebesar 36,72 % atau capaian kinerja sebesar 109,24 %;
- 2) Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, dari target sebesar 100 % terealisasi sebesar 98,80% atau capaian kinerja sebesar 98,80 %.
- 3) Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dari target 62,62 % terealisasi sebesar 65,68 % atau capaian kinerja sebesar 104,89 %;

Pencapaian Indikator Kinerja Utama di atas merupakan hasil kontribusi dari 6 program utama dan 37 kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan Pendapatan Daerah, sebanyak 2 kegiatan;
- 2) Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer, sebanyak 1 kegiatan;
- 3) Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, sebanyak 6 kegiatan;
- 4) Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah, sebanyak 9 kegiatan;
- 5) Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), sebanyak 14 kegiatan;

- 6) Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sebanyak 6 kegiatan;
- 7) Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A, sebanyak 10 kegiatan.

Realisasi anggaran yang mendukung tercapainya sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 48.891.792.731 atau 98,32% dari target sebesar Rp. 49.728.623.000,- dan Realisasi Anggaran Program Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah sebesar Rp. 28.185.743.609,- atau 97,77% dari pagu sebesar (Rp. 28.828.569.000,-). Untuk Realisasi Program Perencanaan Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp. 468.931.350,- atau 99,44% dari pagu sebesar (Rp. 471.577.000,-). Realisasi Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer adalah sebesar Rp. 221.793.993,- atau 99,56% dari pagu sebesar (Rp. 222.765.000,-). Realisasi Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp.1.977.098.030,- atau 98,24% dari pagu sebesar (Rp. 2.012.557.000,-). Realisasi Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah adalah sebesar Rp. 1.768.683.300,- atau 99,86% dari pagu sebesar (Rp. 1.771.147.000,-). Realisasi Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah sebesar Rp. 7.928.654.380,- atau 98,16% dari pagu sebesar (Rp. 8.076.964.000,-). Realisasi Program Optimalisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah sebesar Rp. 1.768.161.200,- atau 99,81% dari pagu sebesar (Rp. 1.771.547.000,-). Realisasi Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah Di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A adalah sebesar Rp. 6.572.726,869,- atau 99,99% dari pagu sebesar (Rp. 6.573.497.000,-). Berdasarkan Realisasi Anggaran untuk Program pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2020 diketahui bahwa persentase realisasi terbesar berada pada Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah Di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A yaitu 99,99%. Berikut dapat dilihat rincian realisasi di bawah ini :

2.1.1 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

- 1) Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1.1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.1.000.000 terealisasi sebesar Rp.1.000.000 atau 100%, dengan output dari rencana 56 wajib pajak terealisasi 0 wajib pajak atau 0%;

2.1.2 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

- 1) Program Perencanaan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1.1. Kegiatan Pengolahan Data dan Analisis Potensi Pendapatan Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.162.536.000 terealisasi sebesar Rp.162.535.500 atau 100 %, dengan output dari rencana jumlah penagihan sebesar 17 dokumen terealisasi sebesar 17 dokumen atau 100%;
 - 1.2. Kegiatan Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.309.401.000 terealisasi sebesar Rp.306.395.850 atau 99,14 %, dengan output dari rencana 6 dokumen terealisasi 6 dokumen atau 100 %;
- 2) Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
 - 2.1. Kegiatan Pengelolaan Dana Transfer, dari rencana anggaran sebesar Rp.222.765.000 terealisasi sebesar Rp.221.793.993 atau 99,56%, dengan output dari rencana 12 dokumen terealisasi 12 dokumen atau 100%;

- 3) Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 5 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
- 3.1. Kegiatan Pembinaan Teknis Aparatur Pemungut Pajak Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.114.981.000 terealisasi sebesar Rp.112.349.000 atau 97,71%, dengan output dari rencana 350 orang terealisasi 249 orang atau 71,14%;
 - 3.2. Kegiatan Sosialisasi Pendapatan Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.822.788.000 terealisasi sebesar Rp.819.983.800 atau 99,66%, dengan output dari rencana 3 media elektronik, 2.000 orang, 7.644 media cetak terealisasi 3 media elektronik, 1.753 orang, 3.209 media cetak atau 76,54%;
 - 3.3. Kegiatan Pengolahan Data dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.461.316.000 terealisasi sebesar Rp.436.107.250 atau 94,54%, dengan output dari rencana 19 dokumen, 2 dokumen terealisasi 12 dokumen, 2 dokumen atau 81,58%;
 - 3.4. Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.128.725.000 terealisasi sebesar Rp.125.707.000 atau 97,66%, dengan output dari rencana 12 dokumen terealisasi 12 dokumen atau 100%;
 - 3.5. Kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi, dari rencana anggaran sebesar Rp.399.194.000 terealisasi sebesar Rp.397.791.980 atau 99,65%, dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi 12 bulan atau 100%;
- 4) Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah terdiri dari 3 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

- 4.1. Kegiatan Penelitian dan Perhitungan Pajak Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.172.920.0000 terealisasi sebesar Rp.172.909.525 atau 99,99%, dengan output dari rencana 16.800 nota perhitungan pajak daerah terealisasi 11.090 nota perhitungan pajak daerah atau 66,01%;
 - 4.2. Kegiatan Penetapan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.233.919.000 terealisasi sebesar Rp.233.908.775 atau 100%, dengan output dari rencana 18.000 dokumen terealisasi 12.592 dokumen atau 69,96%;
 - 4.3. Kegiatan Monitoring Pembayaran Pajak Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.85.366.000 terealisasi sebesar Rp.85.366.000 atau 100%, dengan output dari rencana 12 dokumen terealisasi 12 dokumen atau 69,96%;
- 5) Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terdiri dari 10 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
- 5.1. Kegiatan Pengelolaan Basis Data Obyek Pajak PBB P2, dari rencana anggaran sebesar Rp.951.975.000 terealisasi sebesar Rp.951.160.000 atau 99,91%, dengan output dari rencana 2 kecamatan 53.598 objek pajak terealisasi 2 kecamatan 53.598 objek pajak atau 100%;
 - 5.2. Kegiatan Pengelolaan Zona Nilai Tanah, dari rencana anggaran sebesar Rp.380.794.000 terealisasi sebesar Rp.377.220.300 atau 99,06%, dengan output dari rencana 20 kecamatan 400 objek pajak terealisasi 20 kecamatan 400 objek pajak atau 100%;
 - 5.3. Kegiatan Verifikasi Obyek Pajak PBB P2, dari rencana anggaran sebesar Rp.354.689.000 terealisasi sebesar Rp.354.688.656 atau 100%, dengan output dari rencana 40

- kecamatan 1.500 objek pajak terealisasi 40 kecamatan 1.500 objek pajak atau 100%;
- 5.4. Kegiatan Pemutahiran Data Spasial Objek Pajak PBB P2, dari rencana anggaran sebesar Rp.472.840.000 terealisasi sebesar Rp.433.559.000 atau 91,69%, dengan output dari rencana 1 kecamatan 11.834 objek pajak terealisasi 1 kecamatan 7.827 objek pajak atau 83,07%;
 - 5.5. Kegiatan Perekaman Data PBB P2, dari rencana anggaran sebesar Rp.631.638.000 terealisasi sebesar Rp.631.638.000 atau 100%, dengan output dari rencana 40 kecamatan 150.000 objek pajak terealisasi 40 kecamatan 98.436 objek pajak atau 82,81%;
 - 5.6. Kegiatan Penerbitan Dokumen Ketetapan PBB P2, dari rencana anggaran sebesar Rp.537.704.000 terealisasi sebesar Rp.525.759.560 atau 97,78%, dengan output dari rencana 1.960.000 SPPT PBB terealisasi 1.910.165 SPPT PBB atau 97,46%;
 - 5.7. Kegiatan Pelayanan Wajib Pajak PBB P2, dari rencana anggaran sebesar Rp.800.697.000 terealisasi sebesar Rp.797.246.500 atau 99,57%, dengan output dari rencana 125.000 wajib pajak terealisasi 102.296 wajib pajak atau 97,46%;
 - 5.8. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PBB P2, dari rencana anggaran sebesar Rp.376.801.000 terealisasi sebesar Rp.373.773.555 atau 99,20%, dengan output dari rencana 40 kecamatan 12 dokumen terealisasi 40 kecamatan 12 dokumen atau 100%;
 - 5.9. Kegiatan Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2, dari rencana anggaran sebesar Rp.104.895.000 terealisasi sebesar Rp.104.895.000 atau 100%, dengan output dari rencana 1.812.114 SPPT PBB terealisasi 1.812.113 SPPT PBB atau 100%;

- 5.10. Kegiatan Penanganan Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi, Restitusi, Keringanan dan Pembebasan PBB P2, dari rencana anggaran sebesar Rp.368.490.000 terealisasi sebesar Rp.365.402.500 atau 99,16%, dengan output dari rencana 6.000 wajib pajak terealisasi 5.275 wajib pajak atau 87,92%;
- 6) Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terdiri dari 6 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
- 6.1. Kegiatan Pendataan Potensi BPHTB, dari rencana anggaran sebesar Rp.259.100.000 terealisasi sebesar Rp.259.100.000 atau 100%, dengan output dari rencana 200 perumahan terealisasi 115 perumahan atau 57,50%;
- 6.2. Kegiatan Pengolahan dan Analisis Data Laporan BPHTB, dari rencana anggaran sebesar Rp.124.430.000 terealisasi sebesar Rp.124.430.000 atau 100%, dengan output dari rencana 12 laporan terealisasi 12 laporan atau 100%;
- 6.3. Kegiatan Pelayanan Validasi BPHTB, dari rencana anggaran sebesar Rp.549.010.000 terealisasi sebesar Rp.546.810.000 atau 99,60%, dengan output dari rencana 50.000 berkas terealisasi 34.125 berkas atau 68,25%;
- 6.4. Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB, dari rencana anggaran sebesar Rp.380.832.000 terealisasi sebesar Rp.380.829.600 atau 100%, dengan output dari rencana 50.000 berkas terealisasi 34.125 berkas atau 68,25%;
- 6.5. Kegiatan Pengelolaan Dokumen Administrasi BPHTB, dari rencana anggaran sebesar Rp.227.256.000 terealisasi sebesar Rp.227.256.000 atau 100%, dengan output dari rencana 12 laporan terealisasi 12 laporan atau 100%;
- 6.6. Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi BPHTB, dari rencana anggaran sebesar Rp.230.919.000 terealisasi sebesar

Rp.229.735.600 atau 99,49%, dengan output dari rencana 12 laporan terealisasi 12 laporan atau 100%;

7) Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A terdiri dari 7 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

- 7.1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja, dari rencana anggaran sebesar Rp.375.239.000 terealisasi sebesar Rp.375.203.755 atau 99,99%, dengan output dari rencana 100% terealisasi 87,22%;
- 7.2. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri, dari rencana anggaran sebesar Rp.391.178.000 terealisasi sebesar Rp.391.078.035 atau 99,97%, dengan output dari rencana 100% terealisasi 96,55%;
- 7.3. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol, dari rencana anggaran sebesar Rp.776.817.000 terealisasi sebesar Rp.776.313.731 atau 99,94%, dengan output dari rencana 100% terealisasi 92,32%;
- 7.4. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin, dari rencana anggaran sebesar Rp.482.213.000 terealisasi sebesar Rp.482.210.946 atau 199%, dengan output dari rencana 100% terealisasi 89,18%;
- 7.5. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup, dari rencana anggaran sebesar Rp.688.082.000 terealisasi sebesar Rp.688.082.000 atau 100%, dengan output dari rencana 100% terealisasi 95,00%;
- 7.6. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg, dari rencana anggaran sebesar Rp.874.261.000 terealisasi sebesar Rp.874.260.687 atau 85,23%, dengan output dari rencana 100% terealisasi 87,22%;
- 7.7. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang, dari rencana anggaran sebesar

Rp.956.749.000 terealisasi sebesar Rp.956.748.526 atau 100%, dengan output dari rencana 100% terealisasi 85,66%;

8) Program Program Pelayanan Adminitrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah terdiri dari 39 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

- 8.1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp.2.772.332.000 terealisasi sebesar Rp.2.505.713.038 atau 90,38%, dengan output dari rencana 12 bulan terealisasi 12 bulan atau 100%;
- 8.2. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.1.082.140.000 terealisasi sebesar Rp.1.070.373.500 atau 98,81%, dengan output dari rencana 5 jenis terealisasi 5 jenis atau 100%;
- 8.3. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dari rencana anggaran sebesar Rp.366.464.000 terealisasi sebesar Rp.360.840.000 atau 98,47%, dengan output dari rencana 19.200 porsi terealisasi sebanyak 6.900 porsi atau 35,94%;
- 8.4. Kegiatan Pengelolaan Aset Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.1.309.375.000 terealisasi sebesar Rp.1.299.134.700 atau 99,22%, dengan output dari rencana 12 dokumen terealisasi 12 dokumen atau 100%;
- 8.5. Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.586.791.000 terealisasi sebesar Rp.577.175.000 atau 98,36%, dengan output dari rencana 4 jenis rekening terealisasi 4 jenis rekening atau 100%;
- 8.6. Kegiatan Pengelolaan Keamanan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.347.250.000 terealisasi sebesar Rp.345.384.000 atau 99,46%, dengan output dari rencana 12 orang terealisasi 12 orang atau 100%;
- 8.7. Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.1.063.202.000 terealisasi sebesar

- Rp.1.043.906.500 atau 98,19%, dengan output dari rencana 2 jenis rekening terealisasi 2 jenis rekening atau 100%;
- 8.8. Kegiatan Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan, dari rencana anggaran sebesar Rp.66.850.000 terealisasi sebesar Rp.57.571.300 atau 86,12%, dengan output dari rencana 150 unit 12 bulan terealisasi 3 unit 12 bulan atau 51%;
 - 8.9. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.2.901.869.000 terealisasi sebesar Rp.2.880.254.900 atau 99,26%, dengan output dari rencana 10 jenis rekening 12 bulan terealisasi 10 jenis rekening 12 bulan atau 100%;
 - 8.10. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.2.377.769.000 terealisasi sebesar Rp.2.316.926.600 atau 97,44%, dengan output dari rencana 4 jenis rekening 12 bulan terealisasi 4 jenis rekening 12 bulan atau 100%;
 - 8.11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.2.727.998.000 terealisasi sebesar Rp.2.646.770.585 atau 97,02%, dengan output dari rencana 2 gedung terealisasi 2 gedung atau 100%;
 - 8.12. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Penunjang Gedung Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.1.019.913.000 terealisasi sebesar Rp.1.006.741.750 atau 98,71%, dengan output dari rencana 1 jenis terealisasi 1 jenis atau 100%;
 - 8.13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan, dari rencana anggaran sebesar Rp.945.200.000 terealisasi sebesar Rp.943.059.853 atau 99,77%, dengan output dari rencana 150 unit terealisasi 50 unit atau 66,67%;
 - 8.14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.197.000.000 terealisasi sebesar Rp.190.935.000 atau 96,92%, dengan

output dari rencana 1 jenis rekening terealisasi 1 jenis rekening atau 100%;

- 8.15. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor, dari rencana anggaran sebesar Rp.1.012.007.000 terealisasi sebesar Rp.987.915.000 atau 97,62%, dengan output dari rencana 4 jenis rekening terealisasi 4 jenis rekening atau 100%;
- 8.16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi, dari rencana anggaran sebesar Rp.199.000.000 terealisasi sebesar Rp.194.000.000 atau 97,49%, dengan output dari rencana 2 jenis rekening terealisasi 2 jenis rekening atau 100%;
- 8.17. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.111.068.000 terealisasi sebesar Rp.110.788.500 atau 99,75%, dengan output dari rencana 4 jenis rekening terealisasi 4 jenis rekening atau 100%;
- 8.18. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja, dari rencana anggaran sebesar Rp.649.863.000 terealisasi sebesar Rp.648.328.000 atau 99,76%, dengan output dari rencana 11 jenis rekening terealisasi 11 jenis rekening atau 100%;
- 8.19. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri, dari rencana anggaran sebesar Rp.653.186.000 terealisasi sebesar Rp.650.461.495 atau 99,58%, dengan output dari rencana 9 jenis rekening terealisasi 9 jenis rekening atau 100%;
- 8.20. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol, dari rencana anggaran sebesar Rp.485.933.000 terealisasi sebesar Rp.479.438.335 atau 98,66%, dengan output dari rencana 11 jenis rekening terealisasi 11 jenis rekening atau 100%;

- 8.21. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung, dari rencana anggaran sebesar Rp.734.619.000 terealisasi sebesar Rp.726.678.500 atau 98,92%, dengan output dari rencana 11 jenis rekening terealisasi 11 jenis rekening atau 100%;
- 8.22. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi, dari rencana anggaran sebesar Rp.612.904.000 terealisasi sebesar Rp.610.156.002 atau 99,55%, dengan output dari rencana 11 jenis rekening terealisasi 11 jenis rekening atau 100%;
- 8.23. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin, dari rencana anggaran sebesar Rp.608.196.000 terealisasi sebesar Rp.598.767.075 atau 98,45%, dengan output dari rencana 11 jenis rekening terealisasi 11 jenis rekening atau 100%;
- 8.24. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup, dari rencana anggaran sebesar Rp.760.826.000 terealisasi sebesar Rp.753.379.587 atau 99,02%, dengan output dari rencana 10 jenis rekening terealisasi 10 jenis rekening atau 100%;
- 8.25. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas, dari rencana anggaran sebesar Rp.602.029.000 terealisasi sebesar Rp.588.556.927 atau 97,76%, dengan output dari rencana 12 jenis rekening terealisasi 12 jenis rekening atau 100%;
- 8.26. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg, dari rencana anggaran sebesar Rp.557.713.000 terealisasi sebesar Rp.554.110.786 atau 99,35%, dengan output dari rencana 11 jenis rekening terealisasi 11 jenis rekening atau 100%;
- 8.27. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang, dari rencana anggaran sebesar Rp.737.359.000 terealisasi sebesar

Rp.734.357.526 atau 99,59%, dengan output dari rencana 11 jenis rekening terealisasi 11 jenis rekening atau 100%;

- 8.28. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, dari rencana anggaran sebesar Rp.325.995.000 terealisasi sebesar Rp.320.156.000 atau 98,21%, dengan output dari rencana 7 orang terealisasi 7 orang atau 100%;
- 8.29. Kegiatan Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur, dari rencana anggaran sebesar Rp.21.800.000 terealisasi sebesar Rp.21.800.000 atau 100%, dengan output dari rencana 100 orang terealisasi 100 orang atau 100%;
- 8.30. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas, dari rencana anggaran sebesar Rp.401.000.000 terealisasi sebesar Rp. 393.050.000 atau 98,02%, dengan output dari rencana 200 stel terealisasi 200 stel atau 100%;
- 8.31. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, dari rencana anggaran sebesar Rp.307.540.000 terealisasi sebesar Rp. 302.727.000 atau 98,44%, dengan output dari rencana 6 dokumen terealisasi 6 dokumen atau 100%;
- 8.32. Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur, dari rencana anggaran sebesar Rp.26.595.000 terealisasi sebesar Rp. 26.595.000 atau 100%, dengan output dari rencana 100 orang terealisasi 100 orang atau 100%;
- 8.33. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan, dari rencana anggaran sebesar Rp.121.363.000 terealisasi sebesar Rp. 120.512.500 atau 99,30%, dengan output dari rencana 3 dokumen terealisasi 3 dokumen atau 100%;
- 8.34. Kegiatan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.623.139.000 terealisasi sebesar Rp. 610.653.150 atau 98,00%, dengan output dari rencana 5 jenis rekening terealisasi 5 jenis rekening atau 100%;
- 8.35. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah, dari rencana anggaran

sebesar Rp.281.362.000 terealisasi sebesar Rp. 281.152.000 atau 99,93%, dengan output dari rencana 4 jenis rekening terealisasi 4 jenis rekening atau 100%;

- 8.36. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Anggaran, dari rencana anggaran sebesar Rp.313.816.000 terealisasi sebesar Rp. 312.715.500 atau 99,65%, dengan output dari rencana 4 jenis rekening terealisasi 4 jenis rekening atau 100%;
- 8.37. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.240.974.000 terealisasi sebesar Rp. 240.031.000 atau 99,65%, dengan output dari rencana 3 jenis rekening terealisasi 3 jenis rekening atau 100%;
- 8.38. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.263.129.000 terealisasi sebesar Rp. 261.627.000 atau 99,65%, dengan output dari rencana 5 jenis rekening terealisasi 5 jenis rekening atau 100%;
- 8.39. Kegiatan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.413.000.000 terealisasi sebesar Rp. 413.000.000 atau 100%, dengan output dari rencana 5 jenis rekening terealisasi 5 jenis rekening atau 100%;

2.2.2 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

- 1) Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1.1. Kegiatan Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.85.553.000 terealisasi sebesar Rp.85.159.000 atau 99,54%, dengan output dari rencana 10 dokumen terealisasi 10 dokumen atau 107,42%;

- 2) Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah terdiri dari 5 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
 - 2.1. Kegiatan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.159.221.000 terealisasi sebesar Rp.158.832.700 atau 99,76%, dengan output dari rencana 450 wajib pajak terealisasi 455 wajib pajak atau 101,11%;
 - 2.2. Kegiatan Pelayanan Pengadministrasian Pendaftaran Wajib Pajak Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.271.579.000 terealisasi sebesar Rp.270.067.925 atau 99,44%, dengan output dari rencana 410 wajib pajak terealisasi 534 wajib pajak atau 130,24%;
 - 2.3. Kegiatan Pengolahan dan Analisis Data Pajak Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.340.690.000 terealisasi sebesar Rp.340.649.775 atau 99,99%, dengan output dari rencana 36.000 SPTPD terealisasi 38.554 SPTPD atau 107,09%;
 - 2.4. Kegiatan Intensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.134.258.000 terealisasi sebesar Rp.133.930.400 atau 99,76%, dengan output dari rencana 80 wajib pajak terealisasi 97 wajib pajak atau 121,25%;
 - 2.5. Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.372.194.000 terealisasi sebesar Rp.372.018.200 atau 99,95%, dengan output dari rencana Rp.27.286.069.509 terealisasi Rp.32.191.401.073 atau 117,98%;
- 3) Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan BangunanPerdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terdiri dari 4 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

- 3.1. Kegiatan Penilaian Individual PBB P2, dari rencana anggaran sebesar Rp.352.170.000 terealisasi sebesar Rp.350.769.864 atau 99,60%, dengan output dari rencana 40 kecamatan 128 objek pajak terealisasi 40 kecamatan 152 objek pajak atau 109,38%;
 - 3.2. Kegiatan Pengelolaan Dokumen Administrasi PBB P2, dari rencana anggaran sebesar Rp.694.026.000 terealisasi sebesar Rp.691.965.300 atau 99,70%, dengan output dari rencana 110.000 berkas terealisasi 170.474 berkas atau 154,98%;
 - 3.3. Kegiatan Pelayanan Mobil Keliling PBB P2, dari rencana anggaran sebesar Rp.541.350.000 terealisasi sebesar Rp.540.432.000 atau 99,83%, dengan output dari rencana Rp. 198.767.447.337 terealisasi Rp. 197.590.337.630 atau 130,35%;
 - 3.4. Kegiatan Penagihan PBB P2, dari rencana anggaran sebesar Rp.1.508.895.000 terealisasi sebesar Rp.1.430.144.145 atau 94,78%, dengan output dari rencana Rp. 180.000.000.000 dan 425.000 NOP terealisasi Rp. 116.392.774.270 dan 905.094 NOP atau 138,81%;
- 4) Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A terdiri dari 3 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
- 4.1. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Parung, dari rencana anggaran sebesar Rp.870.018.000 terealisasi sebesar Rp.869.997.000 atau 100%, dengan output dari rencana 100% terealisasi 102,51%;
 - 4.2. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi, dari rencana anggaran sebesar Rp.537.409.000 terealisasi sebesar Rp.537.409.000 atau 100%, dengan output dari rencana 100% terealisasi 101,82%;

- 4.3. Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas, dari rencana anggaran sebesar Rp.621.531.000 terealisasi sebesar Rp.621.423.189 atau 99,98%, dengan output dari rencana 100% terealisasi 111,94%;

2.3.2 Uraian Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

1. Belum tersedianya regulasi terkait pengadaan tenaga fungsional untuk pemungutan pajak daerah;
2. Belum terintegrasinya data dan sistem informasi Perangkat Daerah pengelola pelayanan perizinan terkait potensi pajak daerah;
3. Masih kurangnya SDM yang memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan dalam pemungutan pajak daerah seperti Legal Drafter, Penilai PBB, Pemeriksa Pajak, Pemetaan, Juru Sita Pajak, dan lain-lain;
4. Masih kurangnya ketersediaan jumlah SDM;
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pengelolaan pajak daerah secara elektronik;
6. Belum optimalnya pemanfaatan website sebagai media informasi dan sosialisasi kepada masyarakat baik yang telah menjadi wajib pajak maupun yang belum menjadi wajib pajak;
7. Pembayaran pajak belum tepat waktu dan tepat jumlah;
8. Belum akuratnya bank data sebagai dasar perhitungan potensi dan target pajak daerah;
9. Belum optimalnya penanganan piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan;
10. Masih rendahnya collection ratio PBB Perdesaan dan Perkotaan;
11. Masih adanya pelaporan transaksi peralihan hak milik atas tanah dan bangunan yang tidak sesuai dengan fakta;
12. Masih terdapatnya peralihan hak milik tercatat di BPN namun BPHTB tidak masuk ke kas daerah;

13. Belum optimalnya jangkauan pelayanan Pajak Daerah bagi masyarakat di pelosok kabupaten Bogor;
14. Belum optimalnya pengelolaan dana transfer khususnya DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi oleh Perangkat Daerah Pengguna;
15. Belum optimalnya penggalian potensi pajak daerah;
16. Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah maupun instansi terkait lainnya;
17. Masih rendahnya kontribusi Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebagai salah satu sumber peningkatan PAD selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Masih rendahnya kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dalam mendukung peningkatan PAD.

2.1.2 Uraian Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut :

1. Terhadap program dan kegiatan yang target capaiannya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bogor berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan Kabupaten Bogor;
2. Terhadap program dan kegiatan yang target capaiannya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bogor berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan mengoptimalkan pendataan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ;
3. Terhadap program dan kegiatan yang target capaiannya telah melebihi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bogor berdampak untuk mengoptimalkan pendayagunaan aset daerah untuk menghasilkan PAD.

2.2.2 Uraian Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-faktor Penyebab Tersebut

1. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kabid, Kasubid dan Kasubag yang menangani kegiatan;
2. Perlu adanya pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan Pendapatan Daerah;
3. Perlu adanya peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan prima sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dalam rangka meningkatkan pendapatan;
7. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
8. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka guna terciptanya kepuasan pelayanan prima dan peningkatan pendapatan;
9. Perlu adanya koordinasi dengan daerah lain mengenai penyusunan produk hukum;
10. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data objek dan subjek pajak;
11. Menyelenggarakan pelatihan teknis terkait pemungutan pajak daerah;

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 dapat dilihat melalui tabel 2.1 dibawah ini:

TABEL 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA
PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020**

URUSAN/UNSUR : PENUNJANG
BIDANG URUSAN : KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
0	0	0		Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Jumlah Penerimaan BPHTB	Rupiah	657.280.259 .278						
					2. Jumlah Penerimaan PBB P2	Rupiah	509.676.363 .578						
					3. Jumlah Penerimaan 8 Pajak Daerah Lainnya	Rupiah	802.451.157 .031						
0	0	0	001 8	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang akan dilakukan ekstensifikasi dan ekstensifikasi	Wajib Pajak	252						

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
03	02	07	0034	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dana Penerimaan Piutang Pajak Daerah yang tersedia	Rupiah	36.932.880.057,25						
03	02	07	0037	Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	Dok WP yang diperiksa	60						
03	02	07	0041	Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah yang tersedia	Nota Pajak	18.390						
03	02	07	0045	Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB	Jumlah Target Ketetapan PB P2 Tahun 2018	Rupiah	509.676.363.578						
03	02	07	0065	Penagihan PBB	Jumlah Penerimaan Piutang PBB P2	Rupiah	107.448.163.390						
03	02	07	0071	Pelayanan Validasi BPHTB	Jumlah Berkas BPHTB yang divalidasi	Berkas	49.332						
03	02	07	0074	Penelitian dan Verifikasi SSPD BPHTB	Jumlah Berkas BPHTB yang verifikasi	Berkas	49.332						
03	02	07	0075	Evaluasi dan Pengendalian BPHTB	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian BPHTB	Dokumen	12						
03	02	07	0080	Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	Jumlah Pendaftara Wajib Pajak yang Dilayani	Wajib Pajak	815						
03	02	07	0081	Pendataan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Data Omset Pajak Daerah yang tersedia	SPTPD	43.921						

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
0	0	0	008	Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah yang dapat diterbitka dan didistribusikan	Dokumen	19.949						
0	0	0	008	Analisis Zona Nilai Tanah	Dokumen analisa Zona Nilai tanah untuk Penetapan NJOP	Desa/Kel	240						
0	0	0	008	Up Dating Data PBB	Jumlah Data Objek Pajak PBB P2	Objek Pajak	1.885.444						
0	0	0	008	Monitoring dan Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah titik pembayaran yang dipantau transaksi usaha dan jumlah Sistem Monitoring Transaski Usaha Secara Online	Tapping Box	100						
						Barcode	120						
0	0	0	009	Pendataan dan Pengolahan Data BPHTB	Jumlah data BPHTB yang Dapat Diolah untuk dijadikan potensi target penerimaan BPHTB	Perumahan	270						
0	0	0	009	Penanganan Keberatan dan Pengurangan PBB	Jumlah Wajib Pajak yang tertangani keberatan, pengurangan dan pembetulan PBB	Wajib Pajak	12.552						
0	0	0	009	Verifikasi Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak PBB P2 yang diverifikasi	Wajib Pajak	2.244						

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
0303070094	Monitoring dan Evaluasi PBB	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi PBB	Kecamatan	40									
0303070100	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah	Jumlah Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah yang terintegrasi dengan seluruh bidang	Sistem	1									
			Bulan	12									
0303070101	Pelayanan Mobil Keliling PBB	Jumlah Dana Penerimaan PBB P2 yang terealisasi	Rupiah	226.490.450.881									
0303070102	Pemantauan Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Wajib Pajak yang dipantau	Wajib Pajak	286									
0303070103	Penetapan Nilai Perolehan (NPA) Air Tanah	Jumlah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA)	NPA	10.854									
0303070111	Penilaian Individual PBB	Data Objek dan Subjek PBB P2 yang dimutakhirkan	Objek Pajak	175									
0303070120	Pengolahan Administrasi PBB Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah Data Objek Pajak PBB P2	Objek Pajak	110.700									
0303070121	Pelayanan Loker PBB Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah Wajib Pajak yang dilayani	Wajib Pajak	110.700									
0303070122	Penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah Objek Pajak PBB P2 yang ditetapkan nilai pajaknya	Objek Pajak	1.887.143									

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
03	02	07	0123	Penanganan dan Penyiapan Dokumen Penagihan Sanksi Administrasi BPHTB	Jumlah Dokumen Penagihan Sanksi BPHTB	Dokumen	12						
03	02	07	0124	Penanganan Keberatan BPTHB	Jumlah Berkas Keberatan BPTHB yang dikonfirmasi	Berkas	48						
03	02	07	0125	Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak PBB	Jumlah Desa Kelurahan yang diperbaiki basis data PBB	Desa/Kel							
03	02	07	0126	Pemutakhiran Data Spasial Objek Pajak di Kabupaten Bogor	Jumlah Lokasi dan Objek Pajak yang diperbaharui	Kelurahan	6						
					1. Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah		7.301.959.565.745,18						
					2. Jumlah PAD		2.791.247.410.297,18						
					3. Jumlah Dana Transfer		4.510.712.155.448						
03	02	07	0033	Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Perhitungan Bagia Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan	Dokumen	30						
03	02	07	0042	Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	Dokumen	19						

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020			
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%	
0	0	0	004	Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga	Jumlah Porporasi benda berharga yang terlayani untuk pajak daerah	Jenis	3							
3	2	7	2			Retribusi	4							
						Wajib Pajak	147							
0	0	0	004	Sosialisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	Media cetak dan Tatap Muka	5.065							
3	2	7	7											
0	0	0	004	Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti IHT Pemungutan Pajak Daerah	Orang	693							
3	2	7	8											
0	0	0	005	Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Produk Hukum	Dokumen	15							
3	2	7	9											
0	0	0	007	Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer	Terlaksananya Penagihan Dana Transfer	Rupiah	4.066.481.55 5.448							
3	2	7	7											
0	0	0	008	Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Dokumen	6							
3	2	7	4											
0	0	0	010	Penerapan ISO Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Penerapan ISO	ISO	-							
3	2	7	1											
0	0	0		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
3	2	1												

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
03	02	01	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan	Rekening	4						
					Jumlah Bulan pembayaran rekening	Bulan	12						
03	02	01	0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya	Unit	148						
03	02	01	0008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa pelayanan kebersihan kantor	Orang	15						
					Jumlah Bulan dibayarkannya pelayanan Jasa kebersihan kantor	Bulan	12						
						Jenis	30						
03	02	01	0010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	26						
03	02	01	0011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis	20						
03	02	01	0012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis	13						
03	02	01	0015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang tersedia	Jenis	12						

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019		2020			
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
033	021	0016	001	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis	5						
033	021	0017	001	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang diberikan jamuan makanan dan minuman	Orang	16.812						
033	021	0018	001	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Bulan	12						
033	021	0019	001	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran yang tersedia	Orang	7						
					Jumlah Bulan pembayaran Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran	Bulan	12						
033	021	0020	002	Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD	Jumlah Dokumentasi dan Arsip	Dokumen	8.500						
033	021	0021	002	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pengelolaan Administrasi Kepegawaian BAPPENDA yang dikelola	Dokumen	5						
033	021	0022	002	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Jumlah pelayanan administrasi barang yang tersedia	Dokumen	12						
033	021	0023	002	Penyediaan Sewa Tempat	Jumlah kebutuhan sewa gedung atau kantor UPT	Unit	8						

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
03	02	01	0024	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Jumlah Jasa pelayanan keamanan kantor	Orang	36						
					Jumlah Bulan dibayarkannya pelayanan jasa keamanan kantor	Bulan	12						
03	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
03	02	02	0003	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dibangun - Lift	Unit	2						
03	02	02	0005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional		Unit	2						
03	02	02	0013	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor yang tersedia	Jenis	4						
03	02	02	0014	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	10						
						Unit	102						
03	02	02	0018	Pengadaan Jaringan Listrik, Air, dan Telekomunikasi	Jumlah Kebutuhan Jaringan listrik, air dan omunikasi yang tersedia	Jaringan	1						
03	02	02	0021	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Gedung	1						

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Lantai	3						
0	0	0	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit	114						
3	2	2	3										
0	0	0	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	Jenis	4						
3	2	2	5										
0	0	0	002	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Jenis	8						
3	2	2	9										
0	0	0	003	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor	Jumlah Taman Halaman Kantor yang terpelihara	Jenis	300						
3	2	2	1										
0	0	0		Program Peningkatan Disiplin Aparatur									
3	2	3											
0	0	0	000	Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya yang tersedia	Stel							
3	2	3	2										
0	0	0	000	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang tersedia	Stel	21						
3	2	3	3										
0	0	0		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur									
3	2	5											

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
0	0	0	000	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	123						
0	0	0	000	Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan mental dan rohani	Orang	55						
0	0	0		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
0	0	0	000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja,RAD dan Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Dokumen	33						
0	0	0	000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran	Dokumen	1						
0	0	0	000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1						
0	0	0	000	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran	Dokumen	15						
0	0	0	000	Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan	Dokumen	48						
0	0	0	001	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	16						

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019		2020			
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
0	0	0	001	Publikasi Kinerja SKPD	Jumlah Publikasi Kinerja	Kali	4						
3	2	6	3		Jumlah Sosialisasi pada media massa	Sosialisasi	171						
					Jumlah media visual	Dokumen	4						
0	0	0	001	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Renja Bappenda yang tersedia	Dokumen	4						
3	2	6	4										
3	0	2		Program Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Daerah	Rupiah		7.660.071.379.000	8.137.969.867.680				
3	0	2	000	Pengolahan Data dan Analisis Potensi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah	Dokumen		2	2	100%			
0	3	1	1		Jumlah Dokumen Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Dokumen		2	2	100%			
3	0	2	000	Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah Penerimaan Dana Transfer	Rupiah		4.983.706.432.000	4.976.823.958.308				
0	3	2	1		Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Transfer	Dokumen		12	12	100%			

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
3	0	2		Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rupiah		2.676.364.947.000	2.676.364.947.000				
3	0	2	000	Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah pedoman dan kebijakan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Draft produk hukum		13	13	100%			
3	0	2	000	Pembinaan Teknis Aparatur Pemungut pajak Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah yang meningkat pemahamannya	Orang		550	550	100%			
3	0	2	000	Sosialisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Sosialisasi Media Elektronik	Media Elektronik		3	3	100%			
					Jumlah Sosialisasi Media Cetak	Buah		3.784	7.724	204%			
					Jumlah Sosialisasi Tatap Muka Pendapatan Daerah	Orang		1.500	1.500	100%			
3	0	2	000	Pengolahan Data dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Dokumen		19	19	100%			
					Jumlah Dokumen Perhitungan Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah	Dokumen		2	2	100%			

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
3	0	2	000	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja UPT Pajak daerah dan Rekon BRI dan BJB dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah	Dokumen		12	12	100%			
					Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan Peningkatan PAD selain pajak daerah	Dokumen		12	12	100%			
					Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Dokumen		12	12	100%			
3	0	2		Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah	Jumlah Penerimaan 8 Pajak Daerah	Rupiah		766.320.824.000	766.320.824.000				
					Jumlah Piutang 8 Pajak Daerah yang berbayar	Rupiah		39.271.809.144	554.499.000				
					Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah	Wajib Pajak		4.863	4.863				

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
3034	0001	Intensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan intensifikasi	Wajib Pajak		50	75	150%					
3034	0002	Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan ekstensifikasi	Wajib Pajak		480	508	106%					
3034	0003	Pelayanan Pengadministrasian Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	Jumlah pendaftaran wajib pajak yang dapat dilayani	Wajib Pajak		400	499	125%					
3034	0004	Pengolahan dan Analisis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Omset Wajib Pajak Daerah yang tersedia	SPTPD		35.000	44.590	127%					
3034	0005	Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang membayar tepat jumlah sesuai dengan omset yang diterima	Wajib Pajak		36	37	103%					
3034	0006	Penelitian dan Perhitungan Pajak Daerah	Jumlah Nota Perhitungan Pajak Daerah	Nota Perhitungan Pajak Daerah		16.700	18.229	109%					
3034	0007	Penetapan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah terbit dan terdistribusi	Dokumen		18.080	21.021	116%					
3034	0008	Monitoring Data Pembayaran Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pembayaran Pajak Daerah	Dokumen		12	12	100%					

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
3034	0009	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah piutang 8 pajak daerah yang membayar	Rupiah			39.271.809.144	32.191.401.073	82%				
3035		Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	Jumlah Penerimaan PBB P2				484.759.472.000	572.271.543.387					
			Jumlah Piutang PBB P2 Yang Terbayar				94.128.052.748	40.783.961.867					
			Jumlah SPPT Berbayar/ Jumlah SPPT DHKP * 100% (Collection Ratio)				100,33	49,87					
3035	0001	Pengelolaan Basis Data Obyek Pajak PBB P2	Jumlah Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB (SISMIOP=Sistem Informasi Objek Pajak PBB)	Kecamatan			1	1	100%				
			Jumlah Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB (SISMIOP=Sistem Informasi Objek Pajak PBB)	Objek Pajak			18.403	20.412	111%				
3035	0002	Pengelolaan Zona Nilai Tanah	Jumlah Desa yang disesuaikan dengan Zona Nilai Tanah	Kecamatan			6	6	100%				

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
					Jumlah Dokumen analisa zona nilai tanah untuk penetapan NJOP	Dokumen		3	3	100%			
3030	2000	3	0003	Verifikasi Obyek dan Subjek Pajak Buni dan Bangunan P2	Jumlah objek pajak PBB yang diverifikasi	Objek Pajak		2.035	2.035	100%			
					Jumlah kecamatan yang diverifikasi	Kecamatan		40	40	100%			
3030	2000	4	0004	Penilaian Individual PBB P2	Jumlah kecamatan yang dimutakhirkan Data objek dan subjek PBB	Kecamatan		40	40	100%			
					Jumlah Objek Pajak PBB P2 Non Standar Dan Objek Pajak Khusus Ternilai dan Ditetapan	Objek Pajak		200	200	100%			
3030	2000	5	0005	Pemutakhiran Data Spasial Objek Pajak PBB P2	Jumlah Kecamatan yang dimutakhirkan Data Spasial (Peta) Objek Pajak PBB P2	Kecamatan		1	1	100%			
					Jumlah Dokumen Data Spasial (Peta) Objek Pajak PBB P2	Dokumen		3	3	100%			
3030	2000	6	0006	Perekaman Data PBB P2	Jumlah data objek pajak PBB yang terekam	Objek Pajak		1.819.800	1.896.033	104%			
					Jumlah kecamatan yang dilakukan peremakan data objek pajak PBB	Kecamatan		40	40	100%			

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
3	0	2	000	Pelayanan Wajib Pajak PBB P2	Jumlah Wajib Pajak pada Loker PBB P2 terlayani	Wajib Pajak		90.000	121.345	135%			
3	0	2	000	Pengelolaan Dokumen Administrasi PBB P2	Jumlah Berkas Administrasi PBB P2 yang Tertata	Berkas		40.000	119.760	299%			
3	0	2	000	Penetapan dan Pencetakan Dokumen PBB P2	Jumlah dokumen SPPT yang ditetapkan dan di cetak	Objek Pajak		1.800.000	1.927.712	107%			
3	0	2	001	Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB P2	Jumlah SPPT PBB P2 yang terdistribusikan	SPPT		1.800.000	1.812.113	101%			
3	0	2	001	Penagihan PBB P2	Jumlah NOP berbayar dari piutang PBB P2	NOP		425.000	746.182	176%			
					Jumlah Penerimaan Piutang PBB P2 terbayar	Rupiah		94.128.052.748	139.288.437.430	148%			
3	0	2	001	Pelayanan Mobil Keliling PBB P2	Jumlah NOP berbayar dari piutang PBB P2	NOP		630.000	1.108.975	176%			
					Jumlah Penerimaan PBB P2 dari pelayanan mobil keliling	Rupiah		180.000.000.000	209.488.165.607	116%			
3	0	2	001	Penanganan Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi, Restitusi, Keringanan, dan Pembebasan PBB P2	Jumlah berkas permohonan wajib pajak yang tertangani	Berkas		6.000	8.776	146%			

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
3035	0014	Monitoring dan Evaluasi PBB P2	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi PBB P2	Dokumen		12	12	100%					
3036		Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penerimaan BPHTB	Rupiah		547.450.000.000	594.822.500.000						
3036	0001	Pendataan Potensi BPHTB	Jumlah data perumahan sebagai potensi BPHTB	Perumahan		200	239	120%					
3036	0002	Pengolahan dan Analisis Data Laporan BPHTB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Analisis data Laporan BPHTB	Laporan		12	12	100%					
3036	0003	Penelitian dan Verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB	Jumlah Dokumen SSPD Yang Terverifikasi	SSPD		46.000	58.700	128%					
3036	0004	Pelayanan Validasi BPHTB	Jumlah berkas BPHTB yang tervalidasi	Berkas		46.000	58.700	128%					
3036	0005	Pengelolaan Dokumen Administrasi BPHTB	Jumlah Dokumen Laporan Restitusi, Kompensasi, Pengurangan dan Pembebasan transaks BPHTB	Laporan		12	12	100%					
3036	0007	Pengendalian dan Evaluasi BPHTB	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi BPHTB	Laporan		12	12	100%					

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
300	031			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
300	031	0001		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan		12	12	100%			
300	031	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya	Unit		149	195	131%			
300	031	0003		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	Orang		14	14	100%			
					Jumlah Bulan Jasa pelayanan kebersihan kantor yang dibayarkan	Bulan		12	12	100%			
					Jumlah Jenis Alat dan Bahan Pembersih yang tersedia	Jenis		30	31	103%			
300	031	0004		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran yang tersedia	Orang		7	7	100%			
					Jumlah Bulan pembayaran Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran	Bulan		12	12	100%			

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
					Jumlah tenaga ahli pemeliharaan sistem pajak daerah yang terbiayai	Orang		3	3	100%			
300	031	0021	0021	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Jenis		26	28	108%			
300	031	0022	0022	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetak yang tersedia	Lembar		330.000	330.000	100%			
					Jumlah Lembar Penggandaan yang tersedia	Jenis		20	21	105%			
300	031	0023	0023	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis		13	13	100%			
300	031	0024	0024	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan dibayarkannya media bacaan yang tersedia	Bulan		12	12	100%			
300	031	0025	0025	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang tersedia	Jenis		8	6	75%			
300	031	0026	0026	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan makan minum yang tersedia	Orang		23.750	23.750	100%			
300	031	0027	0027	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dibayarkan	Bulan		12	12	100%			

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
3	0	0	004	Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD	Jumlah dokumen arsip kantor yang tertata dan terdokumentasi sebanyak	Dokumen		100.000	100.000	100%			
3	0	0	004	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Bulan Penyelolaan Administrasi Kepegawaian	Bulan		12	12	100%			
					Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola	Dokumen		6	6	100%			
3	0	0	004	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Jumlah dokumen administrasi barang yang tersedia	Dokumen		12	12	100%			
3	0	0	004	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Jumlah Bulan dibayarkannya pelayanan jasa keamanan kantor	Bulan		12	12	100%			
					Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayarkan	Orang		42	42	100%			
3	0	0	008	Penyediaan Sewa Tempat	Jumlah Gedung Kantor UPT yang dibiayai sewa tempat	Gedung		8	8	100%			
3	0	0		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
3	0	0	001	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung UPT yang dibangun	Gedung		1	0	0%			
					Jumlah lift yang tersedia	Unit		1	0	0%			

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
3	0	0	004	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor yang tersedia	Jenis		8	8	100%			
0	3	2	6			Unit		57	57	100%			
3	0	0	004	Pengadaan Insatalasi Jaringan Listrik, Air, dan Telekomunikasi	Jumlah Kebutuhan Jaringan listrik, air dan komunikasi yang tersedia	Gedung		1	0	0%			
0	3	2	9										
3	0	0	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah GedungKantor yang terpelihara	Jenis		5	5	100%			
0	3	2	2			Lantai		3	3	100%			
3	0	0	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor	Jumlah Taman Halaman Kantor yang terpelihara	Jenis		4	3	75%			
0	3	2	6										
3	0	0	011	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit		137	137	100%			
0	3	2	0										
3	0	0	011	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Jenis		6	6	100%			
0	3	2	1										
3	0	0		Program Peningkatan Displin Aparatur									
3	0	0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Stel		1.500	1.500	100%			
0	3	3	1										

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
3034				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur									
3034	0001			Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Jumlah orang sumber daya aparatur BAPPENDA yang meningkat kemampuannya	Orang		450	450	100%			
3034	0003			Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan mental dan rohani	Orang		5.200	5.200	100%			
3035				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
3035	0001			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi serta perjanjian kinerja Bappenda	Dokumen		33	33	100%			
3035	0002			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Bappenda	Dokumen		1	1	100%			
3035	0003			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Bappenda	Dokumen		1	1	100%			

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
3000	0354	000	000	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan anggaran Bappenda	Dokumen		15	12	80%			
3000	0355	000	000	Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan	Dokumen		48	48	100%			
3000	0356	000	000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bappenda	Dokumen		16	16	100%			
3000	0357	000	000	Publikasi Kinerja SKPD	Jumlah Publikasi Kinerja	Media		20	20	100%			
					Jumlah Sosialisasi pada media massa	Kali		130	130	100%			
3000	0358	000	000	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Bappenda Tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2019	Dokumen		4	4	100%			
3000	0359	000	000	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun	Dokumen		2	2	100%			
3000	031			Program Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah	Rupiah					7.702.379.502.346	7.702.379.502.346	100,00%
3000	031	000	000	Pengolahan Data dan Analisis Potensi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah	Dokumen					17	17	100,00%

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019		2020			
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
3031	0002	Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Dokumen							6	6	100,00%
3032		Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer	Presentase Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah	Rupiah							89,34		
3032	0001	Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Transfer	Dokumen							12	12	100,00%
3033		Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rupiah							2.462.621.761.551		
3033	0001	Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah pedoman dan kebijakan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Dokumen							10	10	100,00%
			Jumlah rupiah Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	Rupiah							2.462.621.761.551	2.827.923.538.176	
3033	0002	Pembinaan Teknis Aparatur Pemungut pajak Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah yang meningkat pemahamannya	Orang							350	249	71,14%
3033	0003	Sosialisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Sosialisasi Media Elektronik	Media Elektronik							3	3	100,00%

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019		2020			
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
					Jumlah Sosialisasi Tatap Muka Pendapatan Daerah	Orang					2.000	1753	
					Jumlah Sosialisasi Media Cetak	Media Cetak					7.644	3209	
3030004				Pengolahan Data dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen data realisasi penerimaan pendapatan daerah : Dokumen laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan	Dokumen					19	12	81,58%
					Jumlah Dokumen Perhitungan Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah untuk 10 Jenis Pajak Daerah dan 2 Retribusi Daerah	Dokumen					2	2	
3030005				Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja UPT Pajak daerah dan Rekon BRI dan BJB dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah	Dokumen					12	12	100,00%
					Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan Peningkatan PAD selain pajak daerah	Dokumen					12	12	
3030006				Pengelolaan Teknologi Informasi	Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	Bulan					12	12	100,00%

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019		2020				
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%	
3	0	3		Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral, Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah	Jumlah Penerimaan 8 Pajak Daerah	Rupiah					679.469.212.000	622.447.196.000		
					Jumlah Piutang 8 Pajak Daerah yang membayar	Rupiah						42.543.644.862	33.775.911.204	
					Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah	Wajib Pajak						4990	3078	
3	0	3	000	Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah wajib pajak yang akan dilakukan ekstensifikasi	Wajib Pajak					450	455	101,11%	
3	0	3	000	Pelayanan Pengadministrasian Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	Jumlah pendaftaran wajib pajak daerah yang dapat dilayani	Wajib Pajak					410	534	130,24%	
3	0	3	000	Pengolahan dan Analisis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Omset Wajib Pajak Daerah yang tersedia	SPTPD					36.000	38554	107,09%	
3	0	3	000	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah wajib pajak yang akan dilakukan intensifikasi	Wajib Pajak					80	97	121,25%	

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
303000	345	Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang akan diperiksa	Wajib Pajak							56	0	0,00%
303000	346	Penelitian dan Perhitungan Pajak Daerah	Jumlah Nota Perhitungan Pajak Daerah	Nota Perhitungan Pajak Daerah							16.800	11090	66,01%
303000	347	Penetapan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah Yang tersedia	Dokumen							18.000	12592	69,96%
303000	348	Monitoring Pembayaran Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring Pembayaran Pajak Daerah	Dokumen							12	12	100,00%
303000	349	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah piutang 8 pajak daerah yang berbayar	Rupiah							27.286.069.509	32.191.401.073	117,98%
303000	35	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)	Jumlah Penerimaan PBB P2	Rupiah							475.563.511.000		
			Jumlah Piutang PBB P2 Yang Terbayar	Rupiah							97.000.000.000		

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019		2020			
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
					Jumlah SPPT Berbayar/ Jumlah SPPT DHKP * 100% (Collection Ratio)	Persentase					92,43		
3	0	3	000	Pengelolaan Basis Data Obyek Pajak PBB P2	Jumlah Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB (SISMIOP=Sistem Informasi Objek Pajak PBB)	Kecamatan					2	2	100,00%
						Objek Pajak					58.463	53.598	91,68%
3	0	3	000	Pengelolaan Zona Nilai Tanah	Jumlah Kecamatan yang disesuaikan dengan Zona Nilai Tanah	Kecamatan					20	20	100,00%
					Jumlah Objek Pajak analisa zona nilai tanah untuk penetapan NJOP	Objek Pajak					650	400	61,54%
3	0	3	000	Verifikasi Obyek Pajak PBB P2	Jumlah kecamatan yang diverifikasi	Kecamatan					40	40	100,00%
					Jumlah objek pajak PBB yang diverifikasi	Objek Pajak					1.500	1.500	100,00%
3	0	3	000	Penilaian Individual PBB P2	Jumlah kecamatan yang dimutakhirkan Data objek dan subjek PBB	Kecamatan					40	40	100,00%

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019		2020			
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
					Jumlah Objek Pajak PBB P2 Non Standar Dan Objek Pajak Khusus Ternilai dan Ditetapkan	Objek Pajak					128	152	118,75%
3	0	3	000	Pemutahiran Data Spasial Objek Pajak PBB P2	Jumlah Kecamatan yang dimutakhirkan Data Spasial (Peta) Objek Pajak PBB P2	Kecamatan					1	1	100,00%
					Jumlah Data Spasial (Peta) Objek Pajak PBB P2	Objek Pajak					11.834	7.827	66,14%
3	0	3	000	Perekaman Data PBB P2	Jumlah data objek pajak PBB yang dilakukan Penetapan Pajak	Objek Pajak					150.000	98436	65,62%
					Jumlah kecamatan yang dilakukan peremakan data objek pajak PBB	Kecamatan					40	40	100,00%
3	0	3	000	Penerbitan Dokumen Ketetapan PBB P2	Jumlah SPPT PBB P2 yang dicetak dan ditetapkan	SPPT PBB					1.960.000	1.910.165	97,46%
3	0	3	000	Pelayanan Wajib Pajak PBB P2	Jumlah Wajib Pajak pada Loker PBB P2 terlayani	Wajib Pajak					125.000	102.296	81,84%
3	0	3	000	Pengelolaan Dokumen Administrasi PBB P2	Jumlah Pemohon Layanan Berkas administrasi PBB P2 yang terkelola	Berkas					110.000	170.474	154,98%
3	0	3	001	Pelayanan Mobil Keliling PBB P2	Jumlah Dana Penerimaan PBB P2 Kegiatan Pelayanan Mobil Keliling yang terealisasi	Rupiah					198.767.447.337	197.590.337.630	99,41%

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019		2020			
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
					Jumlah NOP Kegiatan Pelayanan Mobil Keliling PBB P2 yang terealisasi	NOP					630.000	1.016.097	161,29%
3	0	3	001	Monitoring dan Evaluasi PBB P2	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi PBB P2	Kecamatan					40	40	100,00%
					Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi PBB P2	Dokumen					12	12	100,00%
3	0	3	001	Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2	Jumlah Ketetapan SPPT PBB P2 yang terdistribusikan	SPPT PBB					1.812.114	1.812.113	100,00%
3	0	3	001	Penagihan PBB P2	Jumlah Penerimaan Piutang PBB P2	Rupiah					180.000.000.000	116.392.774.270	64,66%
					Jumlah NOP Penerimaan Piutang PBB P2	NOP					425.000	905.094	212,96%
3	0	3	001	Penanganan Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi, Restitusi, Keringanan dan Pembebasan PBB P2	Jumlah data Wajib Pajak yang tertangani keberatan, pengurangan pembetulan PBB P2	Wajib Pajak					6.000	5.275	87,92%

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019		2020			
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
3	0	3		Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penerimaan BPHTB	Rupiah							
3	0	3	000	Pendataan Potensi BPHTB	Jumlah data perumahan sebagai potensi BPHTB	Perumahan					200	115	57,50%
3	0	3	000	Pengolahan dan Analisis Data Laporan BPHTB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Analisis data Laporan BPHTB	Laporan					12	12	100,00%
3	0	3	000	Penelitian dan Verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB	Jumlah Dokumen SSPD Yang Terverifikasi	Berkas					50.000	34.125	68,25%
3	0	3	000	Pelayanan Validasi BPHTB	Jumlah berkas BPHTB yang tervalidasi	Berkas					50.000	34.125	68,25%
3	0	3	000	Pengelolaan Dokumen Administrasi BPHTB	Jumlah Dokumen Laporan Restitusi, Kompensasi, Pengurangan dan Pembebasan transaks BPHTB	Laporan					12	12	100,00%
3	0	3	000	Pengendalian dan Evaluasi BPHTB	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi BPHTB	Laporan					12	12	100,00%

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020			
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%	
3	0	3		Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah Di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A										
3	0	3	000	Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja per bulan	%						100	87,22	87,22%
3	0	3	000	Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri per bulan	%						100	96,55	96,55%
3	0	3	000	Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol per bulan	%						100	92,32	92,32%
3	0	3	000	Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung per bulan	%						100	102,51	102,51%
3	0	3	000	Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi per bulan	%						100	101,82	101,82%

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019			2020		
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
3	0	3	000	Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin per bulan	%					100	89,18	89,18%
3	0	3	000	Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup per bulan	%					100	95,00	95,00%
3	0	3	000	Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas per bulan	%					100	111,94	111,94%
3	0	3	000	Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg per bulan	%					100	85,23	85,23%
3	0	3	001	Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang per bulan	%					100	85,66	85,66%

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019		2020				
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%	
3	0	0		Program Pelayanan Adminitrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah										
0	3	1	0001		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan	Bulan					12	12	100,00%
3	0	0	0003		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang tersedia	Jenis					5	5	100,00%
0	3	1	0004		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan rapat dan tamu makan minum yang tersedia	Porsi					19.200	6900	35,94%
3	0	0	0050		Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Dokumen					12	12	100,00%
0	3	1	0051		Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah dokumen arsip kantor yang tertata dan terdokumentasi sebanyak	Jenis rekening					4	4	100,00%
3	0	0	0052		Pengelolaan Keamanan Kantor	Jumlah orang pelayanan jasa keamanan kantor	Orang					12	12	100,00%
0	3	1	0053		Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Alat dan Bahan Pembersih yang tersedia	Jenis rekening					2	2	100,00%

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019		2020			
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
300	031	0054	Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang lengkap dan dibayar pajaknya	Unit						150	3	2,00%
300	031	0205	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan Kantor yang tersedia	Jenis rekening						10	10	100,00%
300	031	0206	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Kebutuhan Perengkapan Gedung kantor yang tersedia	Jenis rekening						4	4	100,00%
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Utama Kantor										#DIV/0!
300	031	0251	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	Gedung						2	2	100,00%
300	031	0353	Pemeliharaan Rutin/Berkala Penunjang Gedung Kantor	Jumlah Jenis Kantor yang terpelihara	Jenis						1	1	100,00%
300	031	0354	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit						150	50	33,33%
300	031	0355	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Jenis rekening						1	1	100,00%

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019		2020			
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
3	0	0	035	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang terpelihara	Jenis rekening					4	4	100,00%
3	0	0	035	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi yang terpelihara	Jenis rekening					2	2	100,00%
3	0	0	045	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Jenis Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jenis rekening					4	4	100,00%
3	0	0	090	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jenis rekening					11	11	100,00%
3	0	0	090	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jenis rekening					9	9	100,00%
3	0	0	090	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jenis rekening					11	11	100,00%

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019		2020			
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
3	0	0	090	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jenis rekening					11	11	100,00%
3	0	0	090	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jenis rekening					11	11	100,00%
3	0	0	090	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jenis rekening					11	11	100,00%
3	0	0	090	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jenis rekening					10	10	100,00%
3	0	0	090	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jenis rekening					12	12	100,00%
3	0	0	090	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jenis rekening					11	11	100,00%

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019		2020			
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
30309	Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah Jenis Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jenis rekening								11	11	100,00%
30310	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran yang tersedia	Orang								7	7	100,00%
		Jumlah Bulan pembayaran Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran	Bulan								12	12	
30311	Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan mental dan rohani	Orang								100	100	100,00%
		Jumlah Bulan Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Bulan								12	12	
30312	Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Pramuka yang tersedia	Stel								200	200	100,00%
30313	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola	Dokumen								6	6	100,00%
		Jumlah Bulan Penyelolaan Administrasi Kepegawaian	Bulan								12	12	

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019		2020			
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
3	0	0	100	Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang					100	100	100,00%
					Jumlah Bulan Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Bulan					12	12	
3	0	0	200	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan Bappenda	Dokumen					3	3	100,00%
3	0	0	200	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan	Jenis rekening					5	5	100,00%
3	0	0	200	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi serta perjanjian kinerja Bappenda	Jenis rekening					4	4	100,00%
3	0	0	200	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan anggaran Bappenda	Jenis rekening					4	4	100,00%
3	0	0	200	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis rekening					3	3	100,00%
3	0	0	200	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan Bappenda	Jenis rekening					5	5	100,00%

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2018	2019		2020			
							REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	8= (7/6) x100%	9	10	11 = (10/9) x 100%
3	0	0	200	Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Publikasi Kinerja	Jenis rekening					5	5	100,00%
					Jumlah Sosialisasi media massa	Bulan					12	12	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya rata-rata $\geq 104,31\%$ dari target dikarenakan pada indikator presentase PAD terhadap pendapatan daerah melebihi target. Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2020 dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian tujuan renstra yaitu **“Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang Bersih, Efektif dan Akuntabel”** dengan indikator **Presentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah , Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah dan Presentase Pajak Daerah terhadap PAD**. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka telah ditetapkan 2 (dua) **Indikator sasaran** strategis yaitu :

1. Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Berkualitas, dengan indikator sasaran Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, dengan program dan indikator capaian program sebagai berikut:
 - a. Program Perencanaan Pendapatan Daerah dengan indikator capaian program Jumlah Pendapatan Daerah dan target sebesar Rp 7.709.000.000.000,00 ;
 - b. Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer dengan indikator capaian program Persentase Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah dengan target 63,78 % ;
 - c. Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator capaian program Jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan target Rp 2.792.100.908.536,00 .
2. Tata Kelola Pajak Daerah yang Efektif, dengan indikator sasaran Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan program dan indikator capaian program sebagai berikut:

- a. Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Dan Pajak Air Tanah dengan indikator capaian program Jumlah Penerimaan 8 Jenis Pajak Daerah dengan target Rp 785.191.035.162,00 , Jumlah Piutang 8 Pajak Daerah yang dibayar sebesar Rp 28.498.162.096,00 dan Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah 4.990 wajib pajak;
- b. Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) dengan indikator capaian program Jumlah Penerimaan PBB P2 dengan target Rp 508.291.484.838,00 , Jumlah Piutang PBB P2 Yang Dibayar Rp 96.950.494.330,00 , dan Jumlah SPPT Dibayar/ Jumlah SPPT DHKP * 100% (*Collection Ratio*) 59,27%;
- c. Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan indikator capaian program Jumlah Penerimaan BPHTB dengan target Rp 591.246.000.000,00 ;

Hasil analisis kinerja pelayanan disajikan dalam tabel 2.3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Hingga Tahun 2020, sebagaimana terlampir.

TABEL 2.3

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH HINGGA TAHUN 2020

URUSAN : KEUANGAN

BIDANG URUSAN : PENUNJANG

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2018	2019			2020		
			REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100%	8	9	10 = (9/8)x100%
1	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	38,28						
2	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persentase	70,56						
3	Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase	103,61						
4	Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Persentase	112,75						
5	Kesesuaian Target dan Realisasi Pajak Daerah	Persentase	116,68						

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2018	2019			2020		
			REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100%	8	9	10 = (9/8)x100%
	TUJUAN : Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Bersih, Efektif dan Akuntabel								
	INDIKATOR TUJUAN : Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase		34,19	38,89	113,77	36,22	36,72	101,38
	SASARAN								
1	Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang Berkualitas								
	OUTCOME : Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	Persentase		100,00	106,24	106,24	100,00	98,80	98,80
2	Tata Kelola Pajak Daerah yang efektif								
	OUTCOME : Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persentase		68,33	70,97	103,87	67,50	65,68	97,29

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
2. Belum lengkapnya pedoman dan kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Masih lemahnya kemampuan Petugas Pemungut Pajak Daerah;
4. Rendahnya pemahaman masyarakat, wajib pajak dan stakeholder lainnya dalam upaya Peningkatan Pendapatan Daerah;
5. Kurangnya pengendalian dan evaluasi pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Daerah;
6. Belum Optimalnya Pengelolaan Dana Transfer.

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal yang berada dalam lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam pembentukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan di bidang pendapatan daerah, yang menjadi kewenangan Kabupaten Bogor, melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- c) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan;
- d) Pelaksanaan administrasi Badan; dan

- e) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mengembangkan pelayanan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor diperkirakan akan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain sebagai berikut:

- a) Semakin tingginya kebutuhan terhadap pendapatan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, ditambah dengan adanya pandemi Covid pada awal tahun 2020 hingga saat ini membuat kebutuhan terhadap pendapatan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah semakin meningkat;
- b) Belum optimalnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, menyebabkan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum setara dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c) Belum optimalnya akurasi data potensi pendapatan daerah;
- d) Seiring dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan perubahan *lifestyle* (gaya hidup) masyarakat, maka semakin tinggi pula ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, dan terjangkau (*better, faster, cheaper*);
- e) Semakin menguatnya komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government* seiring dengan agenda reformasi birokrasi.

Selain tantangan-tantangan tersebut, terdapat pula beberapa peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, antara lain sebagai berikut:

- a) Padatnya penduduk dan mahalannya hunian di wilayah DKI Jakarta, mendorong pertumbuhan penduduk di daerah penyangga (*hinterland*) yaitu Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, dengan meningkatnya infrastruktur dan sarana transportasi, Kabupaten satelit Ibu Kota menjadi pilihan masyarakat sebagai tempat tinggal, sehingga hal itu berpotensi meningkatkan PAD Kabupaten Bogor;

- b) Kewajiban membayar pajak harus diiringi dengan sanksi ketika tidak dijalankan, harus dilakukan penyusunan aturan yang memuat sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta penegakan aturan tersebut dengan melibatkan semua pihak terkait;
- c) Tersedianya integrasi sistem sebagai sarana data informasi terpadu dan terpusat yang akurat, valid, dan cermat serta detil mengenai objek pajak, Wajib Pajak serta data-data lain yang terkait dengan perpajakan bersinergi dengan data-data yang dimiliki/dibutuhkan oleh SKPD lainnya (Kependudukan, DPMTSP, BPN, Dinsos);
- d) Kemajuan teknologi informasi dan implementasinya yang semakin meningkat dalam menunjang pelayanan publik berbasis IT;
- e) Dibuatnya suatu sistem dengan menggunakan teknologi yang mempermudah dan mempercepat pembayaran, pengecekan & penelusuran pajak, baik bagi masyarakat sebagai pembayar pajak maupun pemerintah sebagai penerima pajak, bersinergi dengan bidang teknologi lainnya, seperti sistem pembayaran cashless, sistem cetak tagihan mandiri, *complain online robotic*.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2022 diselaraskan dengan Renja Pusat dan Renja Provinsi Jawa Barat. Adapun keterkaitan kebijakan tersebut sebagai berikut :

3.1.1 Uraian Terkait Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2022, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yaitu "**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**", dengan 4 (empat) Fokus Pembangunan, yaitu: (1) Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi; (2) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; (3) Reformasi Sistem Perlindungan Sosial; dan (4) Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Tema pembangunan RKP Tahun 2022 tersebut dijabarkan dalam bentuk prioritas pembangunan nasional. Pada dokumen Rancangan RKP Tahun 2022, telah ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:

A. Prioritas Nasional Tahun 2022

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

B. Sasaran Nasional Tahun 2022

1. SN 1, Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
2. SN 2, Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian;
3. Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dengan Mendorong Transformasi dan Akselerasi Pembangunan Wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Tetap Menjaga Momentum Pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera;
4. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan;
5. Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk;
6. Terpenuhinya Layanan Dasar Bidang Kesehatan;
7. Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
8. Terwujudnya Pengentasan Kemiskinan;
9. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing;
10. Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya;
11. Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan;

12. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial;
13. Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat;
14. Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkukuh Karakter Bangsa;
15. Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif;
16. Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar;
17. Meningkatnya Konektivitas Wilayah;
18. Meningkatnya Layanan Angkutan Umum Massal di 6 (enam) Kota Metropolitan;
19. Meningkatnya Akses dan Pasokan Energi dan Tenaga Listrik yang Merata, Andal, dan Efisien;
20. Meningkatnya Infrastruktur Energi Listrik yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Akses Listrik Terhadap Rumah Tangga Hingga ke Pelosok;
21. Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur Tik, Serta Kontribusi Sektor Informasi dan Komunikasi dalam Pertumbuhan Ekonomi;
22. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
23. Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim;
24. Pembangunan Rendah Karbon; dan
25. Menguatnya Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik.

Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional tersebut, sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada tahun 2020 yaitu terjadinya pandemi COVID-19, maka pada tahun 2022 prioritas pembangunan nasional tahun 2022 ditekankan pada PN-1 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Risiko dari adanya pandemi COVID-19 yaitu terjadinya perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, serta perubahan dan

pergeseran rencana, namun menjadi pemicu terjadinya optimalisasi pengembangan IPTEK.

Secara umum arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2020- 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum;

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu, perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

3.1.2 Uraian Terkait Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 mengacu kepada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Adapun arah kebijakan yang dipilih untuk pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2022, sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitasi penguatan sumberdaya dan lembaga keagamaan serta ekonomi umat;
2. Meningkatkan wawasan ideologi kebangsaan dan kewaspadaan terhadap paham-paham radikalisme dan komunisme melalui penciptaan sistem kewaspadaan dini masyarakat;
3. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan/atau terdampak COVID-19;

4. Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin dan/atau terdampak COVID-19;
5. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin
6. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar;
7. Mengembangkan inkubator bisnis;
8. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing melalui penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai standar WHO;
9. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan;
10. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan melalui upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif;
11. Meningkatkan ketahanan keluarga serta peran dan perlindungan perempuan dan anak;
12. Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah melalui pembentukan center of excellence di setiap kabupaten/kota dan pengembangan SMK yang relevan di kawasan metropolitan;
13. Meningkatkan kesejahteraan, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan menengah melalui sertifikasi kompetensi;
14. Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) penyelenggaraan pendidikan melalui pendidikan jarak jauh, penyediaan e-book gratis di portal pemerintah dengan ditopang kehandalan infrastruktur jaringan TI;
15. Meningkatkan minat baca masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital;
16. Meningkatkan peran organisasi kepemudaan dan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif;
17. Meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal;

18. Mengembangkan fasilitasi peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
19. Meningkatkan kualitas operasional instalasi tenaga listrik;
20. Meningkatkan kemantapan jalan sampai ke pelosok;
21. Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau dan antar moda;
22. Memperkuat infrastruktur dasar desa dan kawasan perdesaan;
23. Mempercepat pemekaran wilayah yang memiliki potensi untuk menjadi DOB;
24. Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara;
25. Meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah domestik;
26. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar permukiman;
27. Meningkatkan kelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya air;
28. Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana;
29. Meningkatkan ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat Jawa Barat serta memperbaiki sistem informasi pangan;
30. Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia;
31. Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata serta meningkatkan kualitas ekonomi kreatif;
32. Mengembangkan industri unggulan Jawa Barat, perwilayah industri, sumber daya industri, sarana dan prasarana industri serta meningkatkan pemberdayaan industri;
33. Meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang; menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok; meningkatkan pemasaran dan penggunaan produk dalam negeri;

- meningkatkan ekspor dan menjaga neraca perdagangan; revitalisasi atau membangun pasar rakyat; serta perlindungan konsumen;
34. Meningkatkan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (*Off Taker* dan Promosi);
 35. Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis *e-government*;
 36. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar tingkat pemerintahan untuk menopang pelaksanaan kawasan metropolitan di Jawa Barat.

Berdasarkan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, tema atau fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 adalah:

“Permantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian”

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kearifan lokal Jawa Barat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan “Jabar Juara” dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat Jawa Barat.

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan isu strategis serta memuat pokok-pokok pikiran tahunan DPRD Tahun 2020 dan janji Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yang tertuang dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2022 dengan arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2022 sangat erat. Terdapat 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Pada tahun 2020 terdapat kejadian luar biasa yang melanda Provinsi Jawa Barat yaitu pandemi COVID19 yang diprediksi akan terus berdampak sampai tahun 2022. Berdasarkan isu strategis tahun 2022, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat fokus menangani pandemi

COVID-19 dan memasukkan kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2022.

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Jawa Barat. Strategi dan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Adapun untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dilakukan melalui 11 (sebelas) prioritas pembangunan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah

Terjadinya pandemi COVID-19 di Jawa Barat memberikan tekanan yang cukup berat bagi sistem kesehatan Provinsi Jawa Barat terutama bagi upaya pencegahan penularan dan meminimalisasi jumlah kematian akibat COVID-19;

2. Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi
Dalam rangka mengatasi dampak yang besar akibat COVID-19 baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu merumuskan kebijakan yang tepat;

3. Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Sektor pertanian terkena dampak pandemi COVID-19 paling kecil dibandingkan sektor lain. Hal ini terjadi karena dampak dari pembatasan sosial akan relatif minimal pada sektor pertanian, walaupun masih ada resiko dari disrupsi rantai penawaran (supply chain) dan terpuruknya permintaan;

4. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Pandemi COVID-19 di Jawa Barat memberikan tekanan yang cukup berat bagi masyarakat terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kondisi tersebut perlu direspon cepat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selain pemulihan ekonomi diperlukan pula perlindungan sosial yang komprehensif.

5. Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan Pandemi COVID 19 merupakan suatu bencana kesehatan yang dapat dikategorikan pada kejadian luar biasa dan merubah hampir seluruh tatanan hidup masyarakat di dunia;
6. Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Bencana pandemi dan wabah penyakit COVID-19 memiliki potensi risiko yang cukup besar jika tidak dilakukan pengendalian secara cepat dan komprehensif;
7. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah merupakan prioritas untuk menjawab isu reformasi birokrasi. Prioritas ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran Misi 3 dan 5 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
8. Gerakan Membangun Desa Gerbang Desa adalah sebuah gerakan untuk mewujudkan desa yang mandiri yaitu desa yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sarana prasarana desa, melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya;
9. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara Pendidikan agama dan tempat ibadah juara merupakan prioritas untuk menjawab isu strategis Jawa Barat yaitu peningkatan kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia;
10. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Infrastruktur konektivitas wilayah merupakan prioritas untuk menjawab isu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan mendukung pencapaian sasaran dan indikator sasaran Misi 3 RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023;
11. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata Pariwisata merupakan sektor yang terdampak cukup berat, terutama dengan adanya kebijakan social distancing/physical distancing saat

pandemi COVID-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), untuk memperlambat penyebaran COVID-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, sehingga keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2022 dengan sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP 2022; Tingkat keterkaitan indikator sasaran pembangunan daerah RKPD Tahun 2022 dengan sasaran PN RKP Tahun 2022; Keselarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2022 dengan PN RKP Tahun 2022; serta Tingkat keselarasan prioritas

Disamping itu, telaahan ini berisi kebijakan nasional lingkup vertikal yang ditetapkan akan dilaksanakan tahun 2022 sebagai tindak lanjut pemulihan ekonomi nasional, reformasi sosial dan penanganan kesehatan masyarakat sebagai bagian dari dampak pandemi dan penanganan covid-19 yang wajib menjadi rujukan perangkat daerah untuk dilaksanakan sesuai kewenangan perangkat daerah. Tabel 3.1 disajikan sebagaimana terlampir.

TABEL 3.1**DUKUNGAN TERHADAP ARAH KEBIJAKAN NASIONAL**

KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	BIDANG/SEKSI/SUBID/UPT PENGAMPU
1	2	3
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	<p>Arah Kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah 2. Meningkatkan pelayanan Pendapatan Asli Daerah 3. Optimalisasi penagihan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya percepatan penerimaan Pendapatan Daerah 4. Optimalisasi Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 5. Meningkatkan pemahaman masyarakat, wajib pajak dan stakeholder lainnya dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Subid Perencanaan - Subid Pengembangan - Subid Pengelolaan Sistem Informasi 2. Bidang Pendataan dan Penilaian <ul style="list-style-type: none"> - Subid Pendataan - Subid Penilaian - Subid Pengolahan Data 3. Bidang Pelayanan dan Penetapan <ul style="list-style-type: none"> - Subid Pelayanan - Subid Verifikasi - Subid Penetapan 4. Bidang Penagihan, Keberatan, dan Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> - Subid Penagihan - Subid Keberatan - Subid Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah

KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	BIDANG/SEKSI/SUBID/UPT PENGAMPU
1	2	3
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Sekretariat - Subag Program dan Pelaporan - Subag Keuangan - Subag Umum dan Kepegawaian

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi Perangkat Daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran memiliki indikator yang dapat menggambarkan ketercapaian visi dan misi pada skala dampak/*impact*.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 mengacu kepada Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yang disesuaikan dengan perkiraan-perkiraan kondisi dan asumsi di Tahun 2022 serta arahan pembangunan daerah yang termuat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yaitu:

“ Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Efektif dan Akuntabel”

Dari tujuan tersebut dirumuskan 1 (satu) sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah yang Efektif, dengan indikator sasaran :
 - 1.1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, dengan target tahun 2022 sebesar 49,67%.
 - 1.2. Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan target tahun 2022 sebesar 69,67%.

TABEL 3.2
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022




URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
				4	
1	2	3			
TUJUAN					
Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Efektif dan Akuntabel		INDIKATOR TUJUAN : Rasio PAD	$PAD/APBD * 100\%$	44,25	Persentase
	SASARAN				
	Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah yang efektif	INDIKATOR SASARAN : 1. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Target PAD/Target Pendapatan Daerah* 100%	49,67	Persentase
		2. Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Target Pajak Daerah/Target PAD * 100%	69,67	Persentase

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan kata lain, Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 maka untuk program dan kegiatan itu mengklasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, disusun berdasarkan Urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka perubahan komposisi klasifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi sebagai berikut :

SEMULA

-	Program	Kegiatan
		
Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
menterjemahkan Sub Urusan	menterjemahkan Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota	menterjemahkan aktivitas/layanan

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah masuk ke dalam Urusan Penunjang, bidang Urusan Keuangan. Adapun hasil pemetaan program dan kegiatan yang telah tercantum dalam rancangan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2022 ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan ketentuan Permendagri

90 Tahun 2019, terdiri dari 1 (satu) Program Utama, 1 (satu) Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

A. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan capaian program :

- Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah, dengan target 100% ;
- Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD, dengan target 5% .

Jumlah kegiatan pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah hanya 1 kegiatan yaitu **“Pengolaan Pendapatan Daerah”** dengan indikator keluaran kegiatan, Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar 4 Dokumen, dengan rincian 14 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, dengan indikator keluaran Jumlah Dokumen Potensi Pajak Daerah dan Target Pendapatan;
2. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, dengan indikator keluaran Jumlah Rancangan Produk Hukum Pajak Daerah;
3. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan indikator keluaran kegiatan Jumlah Media Sosialisasi Tatap Muka, Jumlah Media Sosialisasi Elektronik, Jumlah Media Sosialisasi Cetak;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan indikator keluaran Tersedianya infrastruktur Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Tersedianya Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah;
5. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan indikator keluaran Jumlah Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak, Jumlah Perumahan yang didata, dan Jumlah Wajib Pajak dan Obyek Pajak Daerah yang didata;
6. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, dengan indikator keluaran Jumlah Data Pajak Daerah yang diolah;

7. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan indikator keluaran Jumlah Desa yang Dinilai Ketetapanannya dan Jumlah Obyek Pajak PBB yang dinilai;
8. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah, dengan indikator keluaran Jumlah dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan SPPT;
9. Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan indikator keluaran Jumlah berkas permohonan pelayanan dan Jumlah wajib pajak permohonan pelayanan;
10. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan indikator keluaran Jumlah berkas permohonan yang diteliti;
11. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, dengan indikator keluaran Jumlah piutang yang tertagih;
12. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, dengan indikator keluaran Jumlah permohonan penyelesaian keberatan;
13. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan indikator keluaran Jumlah dokumen laporan;
14. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan indikator keluaran kegiatan Jumlah triwulan 3 jenis retribusi.

Sedangkan Program Penunjang yaitu **“Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah”** dengan 4 (empat) kegiatan (1) Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (2) Administrasi Keuangan, (3) Administrasi Umum, dan (4) Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Adapun Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah berdasarkan PMDN No.90 Tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel 3.3 di bawah ini.

TABEL 3.3
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022

BIDANG / BAGIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
				185.141.903.718
Sekretariat				152.598.671.473
Sub Bag Program dan Pelaporan	1	1	7	1.530.994.872
Sub Bag Umum dan Kepegawaian	1	1	7	31.372.714.288
Sub Bag Keuangan	1	5	39	119.694.962.313
Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah				3.267.715.925
Sub Bidang Perencanaan	1	1	1	617.180.273
Sub Bidang Pengembangan	1	1	2	1.170.465.076
Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi	1	1	1	1.480.070.576
Bidang Pendataan dan Penilaian				3.364.080.812
Sub Bidang Pendataan	1	1	1	1.656.981.856
Sub Bidang Penilaian	1	1	1	984.222.898
Sub Bidang Pengolahan Data	1	1	1	722.876.058

BIDANG / BAGIAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5
Bidang Pelayanan dan Penetapan				5.159.726.410
Sub Bidang Pelayanan	1	1	1	2.609.561.972
Sub Bidang Verifikasi	1	1	1	915.955.340
Sub Bidang Penetapan	1	1	1	1.634.209.098
Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan				5.577.355.004
Sub Bidang Penagihan	1	1	1	2.854.768.348
Sub Bidang Keberatan	1	1	1	997.639.016
Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah	1	1	2	1.724.947.640
UPT Pajak Daerah				15.174.354.094
UPT Sukaraja	2	4	11	1.265.491.823
UPT Gunung Putri	2	3	10	1.178.344.820
UPT Jonggol	2	3	10	1.391.526.935
UPT Parung	2	4	11	1.947.257.946
UPT Ciawi	2	4	11	1.498.453.496
UPT Caringin	2	4	11	1.334.254.268
UPT Citeureup	2	3	10	1.501.117.485
UPT Ciomas	2	4	11	1.535.165.677
UPT Cigudeg	2	4	11	1.626.850.534
UPT Leuwiliang	2	4	11	1.895.891.110

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2022 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan rancangan awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2021 untuk RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2022. Musrenbang menjadi salah satu media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Jawa Barat.

Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2022 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di kabupaten/kota. Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya.

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun anggaran 2022 pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dampak pemberlakuan peraturan tersebut, terjadi perubahan makna dalam beberapa konsep, diantaranya program pembangunan yang disusun dengan memperhatikan subbidang urusan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Makna kegiatan saat ini mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, sub kegiatan kembali dimunculkan ada setelah sebelumnya dihilangkan. Selain itu, ada pula perubahan untuk struktur penganggaran

dengan perubahan yang terjadi diantaranya: struktur pendapatan daerah, dimana merinci sumber pendapatan daerah dengan mengubah nomenklatur dana perimbangan menjadi nomenklatur belanja transfer; perubahan dalam struktur belanja daerah, dengan inti perubahan mengubah nomenklatur kelompok belanja; mengubah komposisi jenis belanja; dan mengubah komposisi pengelolaan keuangan dari PPKD ke Perangkat Daerah.

Dalam konteks teknis implementasi sistem informasi, dilakukan adanya penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk melengkapi aplikasi yang sudah berjalan saat ini. Metode pemetaan yang dilakukan adalah dengan memadupadankan program dan kegiatan RPJMD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 untuk diperoleh kesesuaian klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tidak mengubah target dan indikator dalam RPJMD.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa pada Tahun 2022 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor akan melaksanakan 1 (satu) Program Penunjang yaitu **“Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah”** dengan 4 (empat) kegiatan, sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan jumlah 7 sub kegiatan;
2. Administrasi Keuangan, dengan jumlah 7 sub kegiatan;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan jumlah 8 sub kegiatan;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan jumlah 50 sub kegiatan;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan jumlah 11 sub kegiatan;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan jumlah 32 sub kegiatan;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan jumlah 6 sub kegiatan.

Sedangkan untuk Program Utama terdapat 1 (satu) Program diturunkan ke dalam indikasi Kegiatan yang hanya berjumlah 1 (satu) Kegiatan, dan diturunkan ke dalam sub Kegiatan yang berjumlah 44 (empat puluh empat) sub Kegiatan, masing-masing sub Kegiatan diberikan dukungan

pendanaan yang masih bersifat indikatif yang bersumber dari APBD. Secara keseluruhan, pagu indikatif Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 sebesar Rp. 185.141.903.718,00 .

Rencana kerja dan pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 secara rinci disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut.

TABEL 4.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022

URUSAN/UNSUR : PENUNJANG
BIDANG URUSAN : KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN					185.141.903.718				180.414.913.894
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Capaian Program : Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Indikator : Terlaksananya semua kegiatan pada Program Penunjang	Persentase	100	155.952.390.879			100	149.765.925.413
	Kegiatan :									
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	41	1.530.994.872			41	1.607.544.616
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kali	1	235.971.800	Bappenda	APBD	1	247.770.390

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah dokumen renja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	2				2	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD	Dokumen	1	148.927.300	Bappenda	APBD	1	156.373.665
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	116.790.000	Bappenda	APBD	1	122.629.500
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	1	118.610.800	Bappenda	APBD	1	124.541.340
			Jumlah Dokumen Penyusunan Perjanjian Kinerja	Dokumen	1				1	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	110.907.750	Bappenda	APBD	1	116.453.138
			Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja	Dokumen	1				1	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah (LAKIP, LKPJ, LPPD, Sakip)	Dokumen	4	138.682.650	Bappenda	APBD	4	145.616.783
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja (Evkin Triwulanan) Perangkat Daerah	Dokumen	4	661.104.572	Bappenda	APBD	4	694.159.801

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Dokumen	24				24	
			Jumlah Publikasi Kinerja	Kali	95				95	
	Kegiatan :									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tersedianya pelaporan keuangan perangkat daerah	Laporan	1.790	119.694.962.313			1.790	125.679.710.429
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan perangkat daerah	Orang	210	118.764.583.937	Bappenda	APBD	210	124.702.813.134
			Jumlah bulan perolehan gaji dan tunjangan	Bulan	12				12	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan verifikasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	1100	699.499.076	Bappenda	APBD	1100	734.474.030
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	14	21.801.400	Bappenda	APBD	14	22.891.470
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	1	27.630.500	Bappenda	APBD	1	29.012.025
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	3	21.914.900	Bappenda	APBD	3	23.010.645

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan yang disusun	Dokumen	48	134.638.000	Bappenda	APBD	48	141.369.900
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	1	24.894.500	Bappenda	APBD	1	26.139.225
	Kegiatan :									
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Tersedianya laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase	100	2.703.462.752				2.838.635.890
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	110	250.031.250	Bappenda	APBD	110	262.532.813
			Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang	450				450	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	535	632.800.000	Bappenda	APBD	535	664.440.000
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran yang tersedia	Orang	7	705.792.252	Bappenda	APBD	7	741.081.865
			Jumlah bulan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang dibayar	Bulan	12				12	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya sistem informasi kepegawaian	Sistem	5	223.417.500	Bappenda	APBD	5	234.588.375
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen hasil monitoring	Dokumen	12	230.963.500	Bappenda	APBD	12	242.511.675
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang melakukan pendidikan	Dokumen	2	96.000.000	Bappenda	APBD	2	100.800.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan pelaksanaan peraturan yang disosialisasikan	Bulan	12	114.458.250	Bappenda	APBD	12	120.181.163
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	Kali	1	450.000.000	Bappenda	APBD	1	472.500.000
	Kegiatan :									
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tersedianya kebutuhan pelayanan umum kantor	Persentase	100	5.296.737.435				5.561.574.307
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Listrik Yang Tersedia	Jenis	3	132.983.650	Bappenda	APBD	3	139.632.833
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	20	1.437.576.250	Bappenda	APBD	20	1.509.455.063
			Jumlah Peralatan Kantor yang Tersedia	Jenis	10				10	
			Tersedianya Perlengkapan Kantor	Unit	120				120	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	29	9.868.000	Bappenda	APBD	29	10.361.400
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	16	9.980.900	Bappenda	APBD	16	10.479.945
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	18	9.991.850	Bappenda	APBD	18	10.491.443
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	7	9.999.550	Bappenda	APBD	7	10.499.528
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	32	9.984.900	Bappenda	APBD	32	10.484.145
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	24	9.699.700	Bappenda	APBD	24	10.184.685
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	31	9.948.150	Bappenda	APBD	31	10.445.558

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	17	9.816.735	Bappenda	APBD	17	10.307.572
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	21	9.500.050	Bappenda	APBD	21	9.975.053
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	36	9.998.750	Bappenda	APBD	36	10.498.688
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis	2	118.858.000	Bappenda	APBD	2	124.800.900
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis	27	9.931.000	Bappenda	APBD	27	10.427.550
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis	17	9.976.500	Bappenda	APBD	17	10.475.325
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis	16	7.035.250	Bappenda	APBD	16	7.387.013
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis	22	9.970.050	Bappenda	APBD	22	10.468.553

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis	17	6.611.600	Bappenda	APBD	17	6.942.180
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis	18	7.726.000	Bappenda	APBD	18	8.112.300
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis	21	8.799.650	Bappenda	APBD	21	9.239.633
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis	23	9.939.050	Bappenda	APBD	23	10.436.003
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis	19	9.202.000	Bappenda	APBD	19	9.662.100
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis	24	9.001.750	Bappenda	APBD	24	9.451.838
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang tersedia	Jenis	5	1.117.330.000	Bappenda	APBD	5	1.173.196.500
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan yang tersedia	Jenis	10	232.369.500	Bappenda	APBD	10	243.987.975

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Lembar	12.900	5.040.000	Bappenda	APBD	12.900	5.292.000
			Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan	12				12	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis	1	4.999.750	Bappenda	APBD	1	5.249.738
			Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan	12				12	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis	1	5.250.000	Bappenda	APBD	1	5.512.500
			Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan	12				12	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis	1	5.250.000	Bappenda	APBD	1	5.512.500
			Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan	12				12	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis	1	5.250.000	Bappenda	APBD	1	5.512.500
			Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan	12				12	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis	1	4.999.750	Bappenda	APBD	1	5.249.738
			Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan	12				12	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis	1	1.500.100	Bappenda	APBD	1	1.575.105
			Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan	12				12	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis	1	7.000.000	Bappenda	APBD	1	7.350.000
			Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan	12				12	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Lembar	13.500	5.250.000	Bappenda	APBD	13.500	5.512.500
			Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan	12				12	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	Lembar	13.250	5.250.000	Bappenda	APBD	13.250	5.512.500
			Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia	Bulan	12				12	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan dibayarkannya media bacaan yang tersedia	Bulan	12	137.500.000	Bappenda	APBD	12	144.375.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah porsi yang diberikan makanan dan minuman	Porsi	13.255	245.800.000	Bappenda	APBD	13.255	258.090.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Bulan	12	529.500.000	Bappenda	APBD	12	555.975.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan	12	28.080.000	Bappenda	APBD	12	29.484.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan	11	45.100.000	Bappenda	APBD	11	47.355.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan	12	46.970.000	Bappenda	APBD	12	49.318.500
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan	12	45.680.000	Bappenda	APBD	12	47.964.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan	12	52.850.000	Bappenda	APBD	12	55.492.500
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan	12	50.335.000	Bappenda	APBD	12	52.851.750
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan	12	41.000.000	Bappenda	APBD	12	43.050.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan	12	53.400.000	Bappenda	APBD	12	56.070.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan	12	60.720.000	Bappenda	APBD	12	63.756.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah rapat yang terselenggara	Bulan	11	70.450.000	Bappenda	APBD	11	73.972.500
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan SKPD	Dokumen	48	463.464.000	Bappenda	APBD	48	486.637.200
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya sistem pendukung berbasis elektronik pada SKPD	Sistem	1	150.000.000	Bappenda	APBD	1	157.500.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	15.736.556.700				2.539.299.525
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	Unit	1	251.318.000	Bappenda	APBD	1	263.883.900
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara	Jenis	2	1.017.062.500	Bappenda	APBD	2	1.067.915.625

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan gedung kantor	Gedung	1	10.927.028.000	Bappenda	APBD	1	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Lift	1	2.391.148.200	Bappenda	APBD	1	-
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung	1	190.000.000	Bappenda	APBD	1	199.500.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung	1	211.000.000	Bappenda	APBD	1	221.550.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung	1	154.000.000	Bappenda	APBD	1	161.700.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung	1	110.000.000	Bappenda	APBD	1	115.500.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung	1	185.000.000	Bappenda	APBD	1	194.250.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung	1	150.000.000	Bappenda	APBD	1	157.500.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Gedung	1	150.000.000	Bappenda	APBD	1	157.500.000
	Kegiatan :									
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tersedianya kebutuhan jasa penunjang kantor	Persentase	100	5.343.693.607			100	5.610.878.287
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	3.219.075.000	Bappenda	APBD	12	3.380.028.750
			Jumlah jenis rekening yang dibayarkan	Jenis	4				4	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	40.799.999	Bappenda	APBD	12	42.839.999

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	29.998.560	Bappenda	APBD	12	31.498.488
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	33.592.515	Bappenda	APBD	12	35.272.141
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	39.600.000	Bappenda	APBD	12	41.580.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	16.795.740	Bappenda	APBD	12	17.635.527
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	9.600.176	Bappenda	APBD	12	10.080.185
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	65.992.125	Bappenda	APBD	12	69.291.731
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	28.600.000	Bappenda	APBD	12	30.030.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	18.000.000	Bappenda	APBD	12	18.900.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12	27.600.000	Bappenda	APBD	12	28.980.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	2	19.800.000	Bappenda	APBD	2	20.790.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	2	9.270.000	Bappenda	APBD	2	9.733.500
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	2	9.000.000	Bappenda	APBD	2	9.450.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	2	11.250.000	Bappenda	APBD	2	11.812.500

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	2	9.105.000	Bappenda	APBD	2	9.560.250
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	2	9.240.000	Bappenda	APBD	2	9.702.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	2	9.000.000	Bappenda	APBD	2	9.450.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	2	9.000.000	Bappenda	APBD	2	9.450.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	2	9.800.000	Bappenda	APBD	2	10.290.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis	2	9.300.000	Bappenda	APBD	2	9.765.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan yang dibayarkan	Bulan	12	652.255.236	Bappenda	APBD	12	684.867.998
			Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	Orang	67		Bappenda	APBD	67	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah bulan jasa kebersihan yang dibayarkan	Bulan	12	100.497.072	Bappenda	APBD	12	105.521.926
			Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	Orang	4				4	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah bulan jasa kebersihan yang dibayarkan	Bulan	12	126.521.340	Bappenda	APBD	12	132.847.407
			Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	Orang	5				5	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah bulan jasa kebersihan yang dibayarkan	Bulan	12	100.497.072	Bappenda	APBD	12	105.521.926
			Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	Orang	4				4	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah bulan jasa kebersihan yang dibayarkan	Bulan	12	100.497.072	Bappenda	APBD	12	105.521.926
			Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	Orang	4				4	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah bulan jasa kebersihan yang dibayarkan	Bulan	12	100.497.072	Bappenda	APBD	12	105.521.926
			Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	Orang	4				4	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah bulan jasa kebersihan yang dibayarkan	Bulan	12	100.497.072	Bappenda	APBD	12	105.521.926
			Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	Orang	4				4	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jumlah bulan jasa kebersihan yang dibayarkan	Bulan	12	126.521.340	Bappenda	APBD	12	132.847.407
			Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	Orang	5				5	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah bulan jasa kebersihan yang dibayarkan	Bulan	12	100.497.072	Bappenda	APBD	12	105.521.926
			Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	Orang	4				4	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah bulan jasa kebersihan yang dibayarkan	Bulan	12	100.497.072	Bappenda	APBD	12	105.521.926
			Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	Orang	4				4	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah bulan jasa kebersihan yang dibayarkan	Bulan	12	100.497.072	Bappenda	APBD	12	105.521.926
			Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	Orang	4				4	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya barang milik daerah dengan baik	Persentase	100	5.645.983.200			100	5.928.282.360
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang lengkap dan dibayar pajaknya	Unit	22	207.005.200	Bappenda	APBD	22	217.355.460
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Unit Roda 4	38	1.522.778.000	Bappenda	APBD	38	1.598.916.900
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Unit Roda 2	71				71	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jenis	5	760.620.000	Bappenda	APBD	5	798.651.000
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya aset tetap lainnya	Jenis	4	25.000.000	Bappenda	APBD	4	26.250.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	Gedung	1	2.243.480.000	Bappenda	APBD	1	2.355.654.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Jenis	5	887.100.000	Bappenda	APBD	5	931.455.000
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Capaian Program : Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah	Persentase		29.189.512.839			47,37	30.648.988.481
			Indikator : * Persentase Realisasi Pencapaian Target PAD	Persentase	100,00					
			* Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persentase	5,00					
	Kegiatan :									
	Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen	4	29.189.512.839			7.166.156.444.155	30.648.988.481
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Potensi Pajak Daerah dan Target Pendapatan	Dokumen	14	617.180.273	Bappenda	APBD	14	648.039.287
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Rancangan Produk Hukum Pajak Daerah	Dokumen	12	236.362.050	Bappenda	APBD	12	248.180.153
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Media Sosialisasi Cetak	Buah	2.300	934.103.026	Bappenda	APBD	2.300	980.808.177

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Media Sosialisasi Elektronik	Media	3				3	
			Jumlah Media Sosialisasi Tatap Muka	Orang	1.200				1.200	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya infrastruktur Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	Jaringan	1	1.480.070.576	Bappenda	APBD	1	1.554.074.105
			Tersedianya Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi	5				5	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendaftaran Obyek dan Subyek Pajak	Obyek Pajak	50.000	1.656.981.856	Bappenda	APBD	50.000	1.739.830.949
			Jumlah Perumahan yang didata	Perumahan	100				100	
			Jumlah Wajib Pajak dan Obyek Pajak Daerah yang didata	SPTPD	30.000				30.000	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A SUKARAJA	Jumlah wajib pajak yang di data di wilayah kerjanya	wajib pajak	103.592	45.790.000	Bappenda	APBD	103.592	48.079.500
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A GUNUNG PUTRI	Jumlah wajib pajak yang di data di wilayah kerjanya	wajib pajak	110.956	57.039.450	Bappenda	APBD	110.956	59.891.423

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A JONGGOL	Jumlah wajib pajak yang di data di wilayah kerjanya	wajib pajak	275.771	48.063.200	Bappenda	APBD	275.771	50.466.360
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A PARUNG	Jumlah wajib pajak yang di data di wilayah kerjanya	wajib pajak	152.682	34.197.850	Bappenda	APBD	152.682	35.907.743
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIAWI	Jumlah wajib pajak yang di data di wilayah kerjanya	wajib pajak	60.000	84.829.250	Bappenda	APBD	60.000	89.070.713
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A CARINGIN	Jumlah wajib pajak yang di data di wilayah kerjanya	wajib pajak	376	26.388.550	Bappenda	APBD	376	27.707.978
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A CITEUREUP	Jumlah wajib pajak yang di data di wilayah kerjanya	wajib pajak	295.887	81.568.800	Bappenda	APBD	295.887	85.647.240
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIOMAS	Jumlah wajib pajak yang di data di wilayah kerjanya	wajib pajak	162.083	44.125.500	Bappenda	APBD	162.083	46.331.775
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIGUDEG	Jumlah wajib pajak yang di data di wilayah kerjanya	wajib pajak	183.309	104.269.000	Bappenda	APBD	183.309	109.482.450

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A LEUWILIANG	Jumlah wajib pajak yang di data di wilayah kerjanya	wajib pajak	177.514	52.499.300	Bappenda	APBD	177.514	55.124.265
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak Daerah yang diolah	Objek Pajak	10.000	722.876.058	Bappenda	APBD	10.000	759.019.861
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Desa yang Dinilai Ketetapan	Desa	124	984.222.898	Bappenda	APBD	124	1.033.434.043
			Jumlah Obyek Pajak PBB yang dinilai	Objek Pajak	100		Bappenda	APBD	100	
		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan SPPT	Dokumen	12	1.634.209.098	Bappenda	APBD	12	1.715.919.553
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan SPPT	Berkas	1.970.000		Bappenda	APBD	1.970.000	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah berkas permohonan pelayanan	Berkas Pelayanan	120.000	2.609.561.972	Bappenda	APBD	120.000	2.740.040.071
			Jumlah wajib pajak permohonan pelayanan	wajib pajak	120.000		Bappenda	APBD	120.000	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A SUKARAJA	Jumlah orang yang melakukan konsultasi	orang	1.000	68.300.000	Bappenda	APBD	1.000	71.715.000

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerjanya	dokumen	1.000				1.000	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A GUNUNG PUTRI	Jumlah orang yang melakukan konsultasi	orang	1.425	82.379.550	Bappenda	APBD	1.425	86.498.528
			Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerjanya	dokumen	1.500				1.500	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A JONGGOL	Jumlah orang yang melakukan konsultasi	Orang	2000	134.480.900	Bappenda	APBD	2000	141.204.945
			Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerjanya	Dokumen	2400				2400	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A PARUNG	Jumlah orang yang melakukan konsultasi	orang	1200	168.731.200	Bappenda	APBD	1200	177.167.760
			Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerjanya	dokumen	1680				1680	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIAWI	Jumlah orang yang melakukan konsultasi	orang	3600	87.051.050	Bappenda	APBD	3600	91.403.603
			Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerjanya	dokumen	4000				4000	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A CARINGIN	Jumlah orang yang melakukan konsultasi	orang	1215	103.224.350	Bappenda	APBD	1215	108.385.568
			Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerjanya	dokumen	658				658	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A CITEUREUP	Jumlah orang yang melakukan konsultasi	orang	1500	116.198.550	Bappenda	APBD	1500	122.008.478
			Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerjanya	dokumen	1500				1500	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIOMAS	Jumlah orang yang melakukan konsultasi	orang	1500	78.543.950	Bappenda	APBD	1500	82.471.148
			Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerjanya	dokumen	1200				1200	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIGUDEG	Jumlah orang yang melakukan konsultasi	orang	1400	101.901.000	Bappenda	APBD	1400	106.996.050
			Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerjanya	dokumen	970				970	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A LEUWILIANG	Jumlah orang yang melakukan konsultasi	orang	1450	119.715.950	Bappenda	APBD	1450	125.701.748
			Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerjanya	dokumen	2750				2750	
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah berkas permohonan yang diteliti	Berkas	60000	915.955.340	Bappenda	APBD	60000	961.753.107
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah piutang yang tertagih	Rupiah	130.000.000.000	2.854.768.348	Bappenda	APBD	130.000.000.000	2.997.506.765
		Penagihan Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A SUKARAJA	Jumlah dokumen surat teguran/himbauan kepada wajib pajak	Dokumen	30.365	747.385.752	Bappenda	APBD	30.365	784.755.040
		Penagihan Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A GUNUNG PUTRI	Jumlah dokumen surat teguran/himbauan kepada wajib pajak	Dokumen	111.126	803.078.770	Bappenda	APBD	111.126	843.232.709
		Penagihan Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A JONGGOL	Jumlah dokumen surat teguran/himbauan kepada wajib pajak	Dokumen	86.024	996.646.148	Bappenda	APBD	86.024	1.046.478.455
		Penagihan Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A PARUNG	Jumlah dokumen surat teguran/himbauan kepada wajib pajak	Dokumen	4500	1.311.082.224	Bappenda	APBD	4500	1.376.636.335
		Penagihan Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIAWI	Jumlah dokumen surat teguran/himbauan kepada wajib pajak	Dokumen	812	971.478.884	Bappenda	APBD	812	1.020.052.828
		Penagihan Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A CARINGIN	Jumlah dokumen surat teguran/himbauan kepada wajib pajak	Dokumen	105.753	902.543.670	Bappenda	APBD	105.753	947.670.854

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2022				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penagihan Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A CITEUREUP	Jumlah dokumen surat teguran/himbauan kepada wajib pajak	Dokumen	110.254	1.040.588.770	Bappenda	APBD	110.254	1.092.618.209
		Penagihan Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIOMAS	Jumlah dokumen surat teguran/himbauan kepada wajib pajak	Dokumen	72.961	1.009.243.370	Bappenda	APBD	72.961	1.059.705.539
		Penagihan Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A CIGUDEG	Jumlah dokumen surat teguran/himbauan kepada wajib pajak	Dokumen	33.627	1.057.711.412	Bappenda	APBD	33.627	1.110.596.983
		Penagihan Pajak Daerah - UPT PAJAK DAERAH KELAS A LEUWILIANG	Jumlah dokumen surat teguran/himbauan kepada wajib pajak	Dokumen	42.638	1.341.578.288	Bappenda	APBD	42.638	1.408.657.202
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah permohonan penyelesaian keberatan	Wajib Pajak Daerah	6000	997.639.016	Bappenda	APBD	6000	1.047.520.967
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan kegiatan per semester	Dokumen	2	1.324.947.890	Bappenda	APBD	4	1.391.195.285
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pembinaan tiga jenis retribusi per triwulan	Dokumen	4	399.999.750	Bappenda	APBD	4	419.999.738

BAB V

P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2022 ini disusun untuk dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan, baik yang terkait dalam proses penyusunan maupun pemanfaatannya.

Sebagai tindak lanjut pasca penetapan, dokumen Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2022 wajib dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022.

Cibinong, 2021

KEPALA,

ARIE RAHMAN

NIP. 197507232002121008